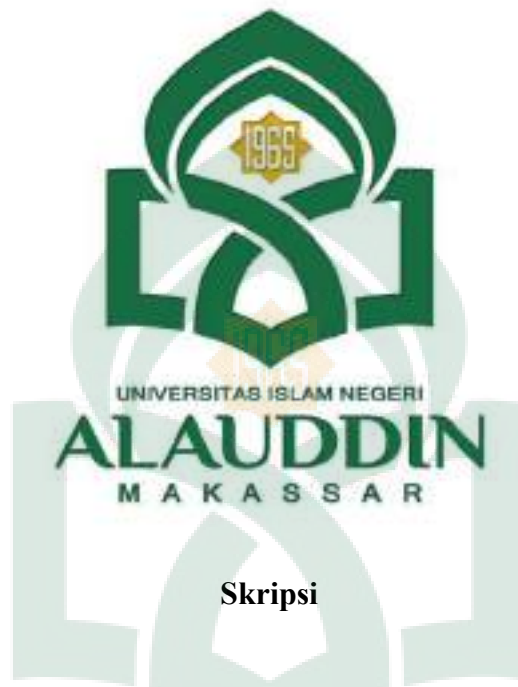


# **TINJAUAN YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN HAK ASUH ANAK KEPADA AYAH**

**(Studi Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa, Gowa Nomor  
935/Pdt.G/2016/PA.Sgm)**



## **Skripsi**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar  
Sarjana Hukum pada Jurusan Ilmu Hukum  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Alauddin Makassar

Oleh :

**Andi Hardyanti Fahri**

NIM: 10400114022

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
2018**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Andi Hardyanti Fahri  
NIM : 10400114022  
Tempat/Tanggal Lahir : Benteng Selayar, 4 Juni 1996  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Fakultas/Program : Syaria'ah dan Hukum  
Alamat : Mallengkeri 1  
Judul : Tinjauan yuridis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hak asuh anak kepada ayah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa, Gowa Nomor 935/Pdt.G/2016/PA.Sgm)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 13 Agustus 2018

Penyusun,

**ANDI HARDYANTI FAHRI**  
**NIM: 10400114022**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul “Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hak Asuh Anak Kepada Ayah (Studi Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa, Gowa Nomor 935/Pdt.G/2016/PA.Sgm)”, yang disusun oleh Saudari **Andi Hardyanti Fahri**, NIM: 10400114022, Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munāqāsyah yang diselenggarakan pada hari Rabu, 21 November 2018 M bertepatan dengan 13 Rabiul Awal 1440 H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar (dengan beberapa perbaikan).

Samata, 21 November 2018 M  
13 Rabiul Awal 1440 H

### DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag (.....)	
Sekretaris	: Istiqamah, S.H., M.H (.....)	
Munaqisy I	: Dr. H. Muh Saleh Ridwan., M.Ag (.....)	
Munaqisy II	: Ahkam Jayadi., S.H., M.H (.....)	
Pembimbing I	: Prof. Dr. Kasjim Salenda., M.Th.I (.....)	
Pembimbing II	: Dr. H. Abd. Halim Talli, M. ag (.....)	

Disahkan oleh:

Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum  
UIN Alauddin Makassar,



Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag.  
NIP. 196210161990031003

## KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah swt. Atas segala limpahan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat merampungkan skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hak Asuh Anak Kepada Ayah (Studi Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa, Gowa Nomor 935/Pdt.G/2016/PA.Sgm)”, sebagai tugas akhir untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Ilmu Hukum di Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini menemukan banyak hambatan dan kesulitan, namun berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak sehingga kesulitan-kesulitan tersebut dapat teratasi. Untuk itu, maka sepantasnya penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tuaku (H. Fahriadi dan Hj. Masdawati) yang selama ini telah mendidik, membimbing serta memberikan do’a restu selama kuliah. Kepada Kakak dan Adik (Andi Syaiful Fahri S.H dan Andi Armelia Fahri) yang selama ini membantu dan memberiku dorongan semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si. Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, beserta Wakil Rektor I, II, III, dan IV UIN Alauddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum. Dr. H. Abd. Halim Talli, M. Ag selaku Wakil Dekan I, Dr. Hamsir, M. Hum selaku Wakil Dekan II, dan Dr. H. M. Saleh Ridwan, M. Ag selaku Wakil Dekan III pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.
3. Ibu Istiqamah, S.H, M.H. Ketua Jurusan Ilmu Hukum, Bapak Rahman Syamsuddin, S.H.,M.H. Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum, yang telah membantu dan memberi motivasi dalam penyelesaian studi penulis di Fakultas Syariah dan Hukum
4. Bapak Prof. Dr. H. Kasjim Salenda,. S.H,. M.Th.I selaku Pembimbing I, Bapak Dr. H. Abd. Halim Talli,. M.Ag. selaku Pembimbing II, yang senantiasa meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, nasehat, petunjuk, saran serta memotivasi penulis hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini
5. Bapak selaku Dr. H. M. Saleh Ridwan, M. Ag Penguji I, Bapak Ahkam Jayadi, S.H., M.H. selaku Penguji II, yang memberikan kritik dan saran dalam penulisan skripsi ini.
6. Para Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, yang dengan segala jerih payah dan ketulusan membimbing dan memandu perkuliahan sehingga dapat memperluas wawasan penulis.

7. Para Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar yang senantiasa membantu penulis dalam penyelesaian administrasi selama perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan Ulfa Damayanti Anwar, Rifka Aulia Utami, Wahyuri, Desi S, Nur Arifah, Nurhafni, Eka Haryanti dan teman-teman yang lain dan tidak sempat saya sebut namanya satu-persatu terima kasih untuk setiap bantuan, motivasi, mulai dari perkuliahan maupun selama penyelesaian skripsi ini.
9. Semua teman-teman seperjuangan angkatan 2014 Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar Khususnya Ilmu Hukum A yang sama-sama berjuang di bangku kuliah sampai lulus.

Akhir kata dengan lapang dada penulis mengharapkan masukan, saran, serta kritikan-kritikan yang membangun untuk lebih menyempurnakan skripsi ini. Terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak memberi bantuan, semoga senantiasa dibalas oleh Allah swt. dan dihitung sebagai pahala.

Makassar, 1 September 2018

Penulis

**ANDI HARDYANTI FAHRI**  
**NIM : 10400114022**

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus .....	7
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	9
<b>BAB II TINJAUAN TEORITIS .....</b>	<b>11</b>
A. Tinjauan Umum Tentang <i>Hak Asuh Anak</i> .....	11
1. Menurut Fikih.....	11
2. Menurut Hukum Perdata .....	13
3. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam.....	20
B. Dasar Hukum Hadhanah .....	23
C. Syarat-syarat Hadhanah .....	25
D. Pihak-pihak yang berhak dalam Hadhanah.....	28
1. Menurut Fikih.....	28
2. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam.....	33

E. Masa Hadhanah.....	34
F. Upah Hadhanah.....	35
G. Batasan Waktu Hadhanah .....	37
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>40</b>
A. Jenis Dan Lokasi Penelitian .....	40
B. Pendekatan Penelitian .....	40
C. Sumber Data.....	41
D. Metode Pengumpulan Data.....	42
E. Instrumen Penelitian.....	43
F. Teknik Pengelolahan dan Analisis .....	43
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>45</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	45
B. Pengaturan pengasuhan anak pasca cerai menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dalam Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa, Gowa Nomor 935/Pdt.G/2016/PA.Sgm) .....	52
C. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hak asuh anak kepada sang Ayah Nomor 935/Pdt.G/2016/PA.Sgm.....	58
D. Analisis Penulis.....	62
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>68</b>
A. Kesimpulan .....	68
B. Saran.....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>70</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	



## PEDOMAN TRANSLITERASI

### *A. Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut :

#### **1. Konsonan**

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	A	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Bc
ت	Ta	T	Tc
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	K	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	S	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	Y	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>fathah</i>	A	a
إ	<i>kasrah</i>	I	i

ا	<i>ḍammah</i>	U	u
---	---------------	---	---

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gambar huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
و	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauila*

### 3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ... ا... ا...	<i>Fathah dan alif atau ya'</i>	a	a dan garis di atas
آ	<i>Kasrah dan ya'</i>	i	i dan garis di atas
و	<i>Dammah dan wau</i>	u	u dan garis di atas

Contoh

مَاتَ : *mata*

رَمَى : *rama*

قِيلَ : *qila*

يَمُوتُ : *yamutu*

#### 4. *Tā' marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu: *tā' marbūtah* yang hidup (*Ta'marbutah* yang hidup (berharakat fathah, kasrah atau dammah) dilambangkan dengan huruf "t". *ta'marbutah* yang mati (tidak berharakat) dilambangkan dengan "h".

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudal al-at fal*

الْمَدِينَةُ الْفَادِلَةُ : *al-madinah al-fadilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

#### 5. *Syaddah (Tasydid)*

Tanda *Syaddah* atau *tasydid* dalam bahasa Arab, dalam transliterasinya dilambangkan menjadi huruf ganda, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* tersebut.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbana*

نَجِّنَا : *najjainah*

#### 6. *Kata Sandang*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyi huruf yang ada setelah kata sandang. Huruf "l" (ل) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang tersebut.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

الفلسفة: *al-falsafah*

البلاد: *al-biladu*

## 7. *Hamzah*

Dinyatakan di depan pada Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun, itu apabila hamzah terletak di tengah dan akhir kata. Apabila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

1. Hamzah di awal

أُمرت : *umirtu*

2. Hamzah tengah

تَأْمُرُونَ : *ta' muruna*

3. Hamzah akhir

شَيْءٌ : *syai'un*

## 8. *Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasinya penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara; bisa terpisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

*Fil Zilal al-Qur'an*

*Al-Sunnah qabl al-tadwin*

### 9. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

الله *Dinullah billah*

Adapun ta’ marbutah di akhir kata yang di sandarkan kepada lafz al-jalalah, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fi rahmatillah*

### 10. *Huruf Kapital*

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf kapital dipakai. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD. Di antaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal dan nama diri. Apabila nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal dari nama diri tersebut, bukan huruf awal dari kata sandang.

Contoh: *Syahru ramadan al-lazi unzila fih al-Qur’an*

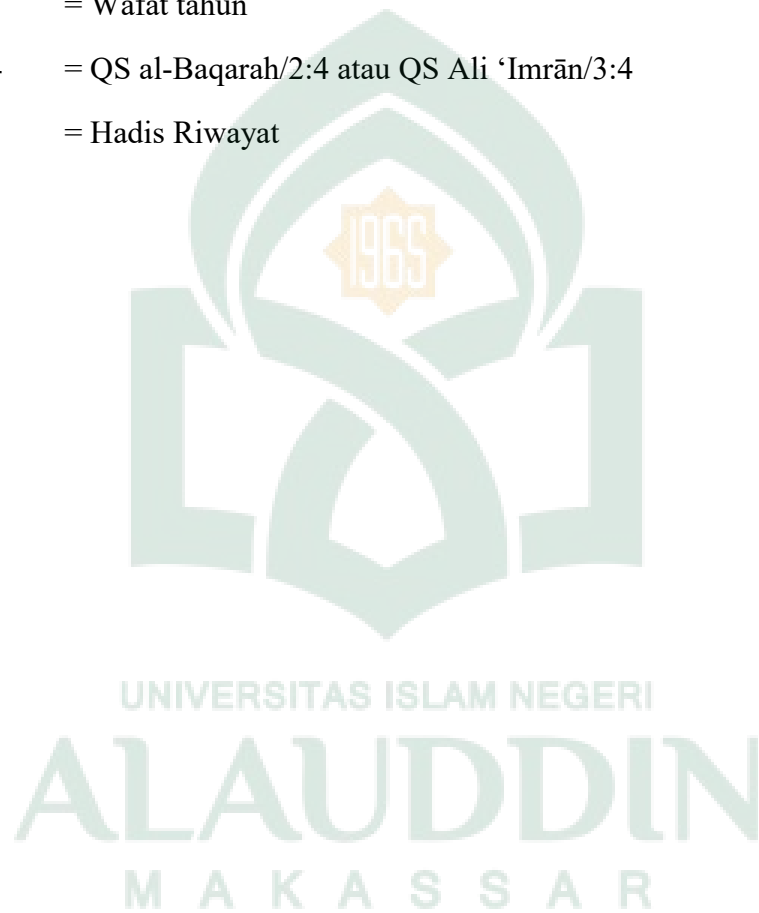
*Wa ma Muhammadun illa rasul*

### B. *Daftar Singkatan*

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt.	= <i>subhānahū wa ta‘ālā</i>
Saw.	= <i>sallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	= <i>‘alaihi al-salām</i>

H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
QS .../...:4	= QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali ‘Imrān/3:4
HR	= Hadis Riwayat



## ABSTRAK

**Nama** : Andi Hardyanti Fahri  
**Nim** : 10400114022  
**Jurusan** : Ilmu Hukum  
**Fakultas** : Syariah dan Hukum  
**Judul Skripsi** : Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hak Asuh Anak Kepada Ayah (Studi Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa, Gowa Nomor 935/Pdt.G/2016/PA.Sgm)

---

Penelitian membahas mengenai Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hak Asuh Anak Kepada Ayah dengan mengambil rumusan masalah yaitu; (1). Bagaimana pengaturan pengasuhan anak pasca cerai menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dalam Kompilasi Hukum Islam? (2). Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan hak asuh harus kepada sang ayah?

Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), dengan fokus pendekatan Normatif Empiris Perundang-Undangan (*statue appach*) dan studi putusan. Sumber data primer dan sekunder, Data primer bersumber dari Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, Data sekunder lainnya adalah bahan-bahan tertulis, buku, majalah, sumber dari arsip, dokumen resmi di lingkungan Pengadilan Agama Sungguminasa. Langkah selanjutnya adalah mengklasifikasikan sesuai dengan permasalahan yang diteliti, kemudian data tersebut disusun dan dianalisa dengan metode deskriptif.

Hadhanah ialah memelihara anak yang belum mumayyiz (belum mampu mengurus dirinya sendiri). Hak pemeliharaan anak akibat perceraian menurut fikih ialah ibu dari pada ayahnya. Sedangkan menurut KHI pada pasal 105 (a) bahwa hak pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak terlalu banyak membahas siapa yang lebih berhak untuk mengasuh anak setelah perceraian, tetapi orang tua berkewajiban memelihara anaknya sampai anak tersebut menikah. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang lebih berhak untuk memelihara anak adalah salah satu dari kedua orang tuanya yang dekat dengan anaknya. Sehingga membuat anak merasa nyaman dan tenang berada disamping salah satu orangtuanya tersebut.

Implikasi dari penelitian ini, anak merupakan suatu tugas yang harus diperhatikan secara betul dan bijak. Karena anak merupakan aset negara yang paling berharga dan generasi yang akan memimpin negara ini ke depan. Mereka pula yang menentukan arah pembangunan dan perbaikan yang lebih baik. Untuk itu, anak harus dididik dan dibesarkan oleh orang yang mempunyai kemampuan, kesempatan dan keahlian yang mapan agar dapat menjamin eksistensi kehidupannya. Hal ini bertujuan agar anak tumbuh dewasa dalam lingkungan yang baik dan berguna bagi bangsa dan Negara ke depan.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### ***A. Latar Belakang Masalah***

Pernikahan adalah suatu peristiwa yang sangat sakral dalam perjalanan umat manusia. Dikatakan sakral karena dalam akad pernikahan yang dilangsungkan tersebut pihak suami mengucapkan akad nikah dimana dia dengan suka rela telah menyatakan qabul dari ucapan ijab wali calon istri. Sebab dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 disebutkan *"Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah"*.

Pernikahan juga merupakan jalan untuk menyalurkan naluri manusia untuk memenuhi nafsu syahwatnya yang telah mendesak agar terjaga kemaluan dan kehormatannya. Jadi pernikahan adalah kebutuhan fitrah manusia yang harus dilakukan oleh setiap manusia. Begitu pentingnya pernikahan dalam Islam, Rasulullah pun sangat menekankan pernikahan terhadap umatnya untuk melaksanakan pernikahan.

Syariat Islam juga merupakan ajaran yang mengatur hubungan antara sesama manusia maupun hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Tujuan utama syariat adalah memelihara kesejahteraan manusia yang mencakup perlindungan keimanan, kehidupan, akal, keturunan dan harta benda mereka. Apa saja yang menjamin terlindungnya lima perkara ini adalah maslahat bagi manusia

dan dikehendaki. Melindungi lima keturunan oleh manusia adalah yang harus dijaga.<sup>1</sup>

Hadhanah adalah suatu kewajiban orangtua untuk merawat dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya. Pemeliharaan yang mencakup masalah ekonomi, pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok untuk anak.<sup>2</sup>

Hadhanah menurut bahasa, berarti melakukan sesuatu dekat tulang rusuk atau di pangkuan, karena ibu waktu menyusukan anaknya meletakkan anak itu dipangkuan, seakan-akan ibu disaat melindungi dan memelihara anaknya sehingga “hadhanah” di jadikan istilah yang dimaksud : “pendidikan dan pemeliharaan berdiri sendiri mengurus dirinya yang dilakukan oleh kerabat anak itu.”<sup>3</sup>

Para ulama fiqih Mendefinisikan hadhanah sebagai tindakan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar tapi belum mumayyiz, menyediakan suatu yang sudah menjadi kebajikannya, menjaganya dari suatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani maupun rohani.<sup>4</sup> Seorang anak pada permulaan hidup sampai pada umur tertentu memerlukan orang lain dalam kehidupan, baik dalam pengaturan fisik maupun dalam bentuk akhlakny. Seseorang yang melakukan tugas *hadhanah* sangat berperan dalam hal tersebut. Oleh karena itu masalah *hadhanah* mendapat perhatian khusus dalam ajaran islam. Dipundak kedua tuanya melakukan tugas

---

<sup>1</sup>Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: CV. Pustaka Setia, 1999), h. 171.

<sup>2</sup>Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2014), h. 293.

<sup>3</sup>Wahbah Az Zuhaily, *Fiqih Islam Wa Adilaatuhu* (Jakarta: PT. Darul Fiqir, 2011), h. 59.

<sup>4</sup>Tihammi, Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2013) h. 215-16.

kewajiban tersebut, melaksanakan tugas *hadhanah* dapat diwujudkan selama kedua orang tuanya masih tetap dalam hubungan suami istri.

Untuk kepentingan seorang anak, sikap peduli dari kedua orang tua masalah *adhanah* memegang sangat diperlukan. Jika tidak maka bisa mengakibatkan seorang anak tidak terpelihara dan tidak seperti di harapkan ataupun kurang kasih sayang dari orang tuanya. Maka yang paling diharapkan adalah kerja sama antara keduanya hanya akan bisa diwujudkan apabila kedua orang tuanya masih berstatus suami istri. Dalam suasana yang demikian, walaupun tugas *hadhanah* sesuai dengan tabiatnya akan lebih banyak dilakukan oleh pihak ibu, namun peranan seorang ayah tidak bisa diabaikan, baik dalam memenuhi segala kebutuhan yang memperlancar tugas *hadhanah*, maupun dalam menciptakan suasana damai dalam rumah tangga dimana anak diasuh dan dibesarkan. Harapan diatas tersebut tidak akan tercapai bilamana terjadi perceraian, khususnya bagi pasangan yang sudah memiliki anak, timbul permasalahan siapakah yang lebih berhak diantara keduanya terhadap anak, yang selanjutnya melakukan tugas *hadhanah*. masalahnya akan menjadi rumit, jika masing-masing dari kedua orang tua memiliki hak atas anaknya dan tidak mau mengalah salah satu dari mereka.<sup>5</sup>

Apabila dua orang suami bercerai sedangkan keduanya mempunyai anak yang belum mumayyuz (belum mengerti kemaslahatan dirinya), maka istiralah

---

<sup>5</sup>Satria Effendi M. Zein dan Said Agil Al Munawar, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2004), h. 167.

yang berkawajiban untuk mendidik dan merawat anak itu hingga ia mengerti akan kemaslahatan dirinya.<sup>6</sup>

Bila salah seorang ibu dan ayah itu ingin melakukan perjalanan yang akan kembali pada waktunya, sedangkan yang satu lagi menetap di tempat lebih berhak mendapatkan hadhanah. Alasannya yaitu bahwa perjalanan itu mengandung resiko dan kesulitan bagi si anak.

Muderis Zaini berpendapat bahwa keluarga mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia sebagai manusia sosial dan merupakan masyarakat kecil yang terdiri dari seorang ayah, ibu dan anak.<sup>7</sup>

Perceraian memang berpangkal pada perselisihan antara suami dan istri. Salah satu pihak menghendaki perceraian, oleh karena pihak yang lain berbuat sesuatu yang menyebabkan hubungan keluarga renggang. Orang yang lebih berkewajiban mengasuh anak adalah ibu.<sup>8</sup>

Menurut Mazhab Hanafi dan maliki berpendapat bahwa hadhanah itu menjadi hak ibu sehingga ia dapat saja menggugurkan haknya. Sedangkan menurut jumhur ulama, hadhanah yaitu menjadi hak bersama antara kedua orang tua dan anak. Bahkan menurut wahbah-al-zuhaili, hak hadhanah yaitu bersyarikat antara ibu, ayah dan anak apabila terjadi pertengkaran maka yang didahulukan adalah hak kepentingan si anak.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup>Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam* (Cet. 3; Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003), h. 426

<sup>7</sup>Muderis Zaeni, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), h. 7.

<sup>8</sup>Al-Hamdani, *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 318.

<sup>9</sup>Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2014), h. 293.

Namun dalam *Hadhanah*, Agama Islam telah memberikan syarat kepada seorang pengasuh yaitu: berakal, baligh, mempunyai kemampuan dan kemauan untuk mendidik anak yang diasuh, dapat dipercaya, dan juga harus beragama Islam atau seakidah dengan sang anak.

Tetapi berbeda dengan pendapat yang telah dikemukakan oleh, Golongan Hanafi, Ibnu Qasim serta Abu Tsaur berpendapat bahwa *hadhanah* tetap dapat dilakukan oleh pengasuh (*hadhinah*) yang kafir, sekalipun si anak kecil itu muslim. Sebab *hadhanah* itu tidak lebih dari menyusui dan melayani anak kecil itu muslim. Kedua hal ini boleh dikerjakan sekalipun oleh perempuan kafir.<sup>10</sup>

Orang yang akan menjadi pengasuh anak disyaratkan mempunyai *Kafa'ah* atau martabat yang sepadan dengan kedudukan si anak, mampu melaksanakan tugas sebagai pengasuh anak. Karena, dengan adanya kemampuan dan *kafa'ah*, maka mencakup beberapa syarat tertentu, dan apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka gugurlah haknya untuk mengasuh anak.

Dalam tatanan hukum Indonesia, untuk mendapatkan hak asuh anak harus ditempuh melalui litigasi supaya adanya kepastian hukum. Kedua orang tua memiliki kesempatan sama menuntut hak asuh supaya ditetapkan di bawah asuhannya masing-masing. Permintaan hak pengasuhan dapat dimasukkan ke dalam gugatan perceraian atau cerai talak maupun diajukan secara terpisah. Secara yuridis normatif, ibu merupakan orang yang lebih berhak mengasuh anak. Sebagaimana seperti yang kita ketahui di Pasal 105 huruf (a) KHI menyebutkan pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah

---

<sup>10</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah* 8 (Bandung: PT. Al Ma'rif, 1996), h. 168.

hak ibunya. Keutamaan ibu sebagai pengasuh anak, selain terdapat dalam hukum positif indonesia, juga terdapat dalam hadis Rasulullah Saw.

Dalam islam, perkawinan tidak terikat dalam ikatan mati dan tidak pula mempermudah terjadi perceraian. Perceraian baru boleh dilakukan jika memang benar dalam kondisi yang sangat darurat dan terpaksa, sebagai solusi akhir dalam menyelesaikan masalah rumah tangga. Perceraian dibolehkan apabila terjadi hal terseut lebih baik dari pada tetap dalam ikatan perkawinan tetapi tidak tercapai kebahagiaan dan selalu ada salam penderitaan, sebagaimana di tulis oleh Sayyid sabiq bahwa lepasnya ikatan perkawinan sangat dilarang kecuali terdapat alasan yang dibenarkan terjadi hal yang sangat darurat.

Menurut Hukum Islam setelah terjadinya suatu perceraian maka akan menimbulkan akibat hukum tertentu, salah satunya menhenai anak. Ketentuan Kompilasi Hukum Islam dalam mengatur pengasuhan anak (*hadhanah*) terdapat pada pasal 105 yang berbunyi :

1. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
2. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik akan mengkaji lebih jauh mengenai pelimpahan hak asuh anak tersebut dalam skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURISDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN HAK ASUH ANAK KEPADA AYAH”**

## **B . Rumusan Masalah**

Permasalahan, berdasarkan latar belakang diatas maka pokok masalah yang diteliti adalah bagaimana tinjauan yuridis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hak asuh anak kepada ayah. Selanjutnya pokok masalah tersebut dijabarkan dalam sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan pengasuhan anak pasca cerai menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dalam Kompilasi Hukum Islam?
2. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan hak asuh harus kepada sang ayah?

## **C. Fokus penelitian dan Deskripsi Fokus**

Yang di fokuskan oleh penulis adalah tinjauan yuridis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hak asuh anak kepada ayah dan kaitannya dengan rumusan masalah yaitu faktor apa saja yang menyebabkan hak asuh anak di berikan kepada sang ayah.

Adapun pengertian dari hadhanah secara etimologis adalah di samping atau berada di bawah ketiak. Adapun secara terminologis hadanah, yaitu merawat dan mendidik seseorang yang belum *mumayyiz* atau yang kehilangan kecerdesannya, karena mereka tidak bisa memenuhi kepeluannya sendiri.

## **D. Kajian Pustaka**

Dari beberapa penelusuran yang telah dilakukan, tidak ditemukan penelitian secara spesifik sama dengan penelitian ini. Namun, ditemukan beberapa penelitian yang memiliki pembahasan yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian-penelitian tersebut dikategorikan sebagai berikut:

1. Dr. H. Amiur Nuruddin, MA dan Drs. Azhari Akmal Tarigan, M.Ag  
“Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 samapai KHI). Dalam buku ini tidak secara spesifik membahas tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hak asuh anak kepada ayah. Namun dalam buku ini hanya membahas tentang pengertian dari hadhanah.
2. Sayyid sabiq “Fiqih Sunnah Jilid 8 tentang Hadhanah”. Dalam bukun ini membahas apabila terjadi perpisahan antara ibu dan ayah sedang mereka punya anak, maka ibulah yang lebih berhak dari terhadap anak dari pada ayahnya. Namun dalam buku ini tidak membahas kedudukan hak asuh anak.
3. Satria Effendi M. Zein. Dalam bukunya Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yuridis dengan Pendekatan Ushuliyah. Dalam buku ini menjelaskan dengan rinci tentang problematika dalam hal hadhanah anak dan syarat beragama islam bagi yang melakukan hadanah anak yang beragama islam.
4. Moh Anas Maulana Ibroohim “PELIMPAHAN HAK ASUH ANAK KEPADA BAPAK AKIBAT PERCERAIAN (Studi Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 345/Pdt.G/2007/PA..Bks.)”. Secara spesifik skripsi ini berbeda dengan skripsi yang di buat oleh penulis karena penelitian yang akan dilakukan oleh penulis tertuju pada faktor penyebab dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan hak asuh harus kepada sang ayah.



5. Dodi Sahrian “PENYELESAIAN PERKARA HADHANAH DI PENGADILAN AGAMA KELAS IA TANJUNG KARANG (ANALISIS PUTUSAN NOMOR: 0718/PDT.G/2012/PA.TNK)”. Berdasarkan judul bahwa dalam skripsi ini membahas tentang pengasuhan hak hadhanah kepada ayah terhadap anak yang belum berumur 12 tahun (belum mumayyiz), skripsi ini berbeda dengan skripsi penulis.

#### ***E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian***

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini tentunya tidak akan menyimpang dari apa yang dipermasalahkan sehingga tujuannya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan pengasuhan anak pasca cerai menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan no.1 dan Kompilasi Hukum Islam?
2. Untuk mengetahui proses putusan hakim dalam menjatuhkan hak asuh anak kepada ayah?

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis
  - a. Dapat memberikan informasi maupun sarana bahan pertimbangan bagi para penegak hukum dalam menyikapi dan menangani kasus yang berkaitan dengan tindak pidana sehingga kedepannya praperadilan dapat dijadikan alat bagi para pencari keadilan.
  - b. Agar masyarakat dapat mengetahui pengaruh buruk dari perceraian apabila anak yang akan menjadi korban.

2. Manfaa Teoritis

Diharapkan penelitian agar ini memberikan sumbangan pemikiran untuk dijadikan bahan penelitian yang akan datang, dan juga sebagai teguran terhadap pemerintah untuk lebih sigap menanggapi kasus pelayanan public yang merugikan masyarakat.



## **BAB II**

### **TINJAUAN TEORITIS**

#### ***A. Tinjauan Umum Tentang Hak Asuh Anak***

##### **Pengertian Hak Asuh Anak (Hadhanah)**

###### **1. Menurut Fikih**

Hadhanah menurut bahasa berarti melakukan sesuatu dekat tulang rusuk seperti menggendong, atau meletakkan sesuatu dalam pangkuan. Seorang ibu waktu menyusukan, meletakkan anak dipangkuan, dan melindunginya dari segala yang menyakitinya. Erat hubungannya dengan pengertian tersebut, hadhanah menurut istilah adalah bertugas menjaga dan mengasuh tau mendidik bayi atau anak kecil sejak dia lahir sampai mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri.<sup>1</sup>

Hadhanah berasal dari bahasa Arab yang mempunyai arti antara lain: Hal memelihara, mendidik, mengatur, mengurus, segala kepentingan/urusan anak-anak yang belum mumayyiz (belum dapat membedakan baik dan buruknya sesuatu atau tindakan bagi dirinya). Hadhanah, menurut bahasa berarti meletakkan sesuatu di dekat tulang rusuk atau di pangkuan, karena ibu waktu menyusukan anaknya meletakkan anak itu di pangkuan, seakan-akan ibu disaat itu melindungi dan memelihara anaknya sehingga “hadhanah” di jadikan istilah yang maksudnya: “pendidikan dan pemeliharaan berdiri sendiri mengurus dirinya yang dilakukan oleh kerabat anak itu.”<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Said Agil Husein Al Munawar, *Problematisa Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 166.

<sup>2</sup>Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2013), h. 215.

Dalam buku hukum Perdata Islam di Indonesia, dikatakan bahwa *hadhanah* adalah memelihara seorang anak yang belum mampu hidup mandiri yang meliputi pendidikan dan segala sesuatu yang diperlukannya baik dalam bentuk melaksanakan maupun dalam bentuk menghindari sesuatu yang dapat merusaknya.<sup>3</sup>

Dalam ajaran Islam diungkapkan bahwa tanggung jawab ekonomi keluarga berada dipundak suami sebagai kepala rumah tangga, dan tidak tertutup dan kemungkinan tanggung jawab itu beralih kepada isteri untuk membantu suaminya bila suaminya tidak mampu melaksanakan kewajibannya. Oleh karena itu, amat penting mewujudkan kerjasama dan saling membantu antara suami isteri dalam memelihara anak sampai ia dewasa. Hal ini yang dimaksud pada prinsipnya adalah tanggung jawab suami isteri kepada anak-anaknya.<sup>4</sup>

Para ahli hukum Islam sepakat bahwa ibu adalah orang yang paling berhak melakukan *hadhanah*. Namun mereka berpendapat dalam hal-hal yang lain terutama tentang lamanya masa asuhan seorang ibu, siapa yang paling berhak setelah ibu dan juga tentang syarat-syarat yang menjadi ibu pengasuh. Selama tidak ada hal yang menghalangi untuk memelihara anak-anak, maka ibulah yang harus melakukan *hadhanah*, kecuali ada sesuatu halangan yang mencegahnya untuk melaksanakan *hadhanah*, maka Pengadilan Agama dapat menetapkan siapa yang pantas menjadi pengasuh dari anak-anak tersebut.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafindo, 2006), h. 67.

<sup>4</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafindo, 2006), h. 64.

<sup>5</sup>Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: PT. Kencana, 2006), h. 424-425.

## **2. Menurut Hukum Perdata**

Dalam pasal 330 kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan “Belum dewasa ialah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian.”

Dalam KUHPerdata, dengan adanya perceraian maka kekuasaan orang tua terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan itu akan berakhir dan anak-anak diletakkan di bawah perwalian. Tetapi orang tua yang tidak menjadi wali tetap harus memberikan tunjangan untuk pemeliharaan dan pendidikan. Tentang siapa-siapa yang berhak menjadi wali anak-anak akan diputus oleh Hakim ketika pesidangan.

Dalam sebuah rumah tangga kehadiran seorang anak merupakan suatu yang bernilai harganya, baik kedua orang tua anak tersebut maupun bagi anggota masyarakat yang lain, sebab anak merupakan asset masa depan sekaligus penerus yang akan datang.

Tetapi terkadang kehadiran seorang anak tidak menjadi suatu pengikat dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga seseorang suatu perkawinan tidaklah selalu berjalan dengan mulus dan diliputi berbagai persoalan yang dapat berujung kepada hancurnya rumah tangga tersebut. Perceraian diperbolehkan

apabila sudah terjadi pelanggaran terhadap hal-hal yang sangat prinsip di dalam rumah tangga.

Akibat dari perceraian atau boleh dikatakan dampak dari perceraian adalah munculnya masalah baru yaitu hak asuh anak, hak asuh anak merupakan salah satu bagian penting dari sebuah peristiwa hukum akibat perceraian selain masalah harta bersama.

Pada prakteknya mengenai permintaan hak asuh anak-anak ini biasanya diajukan oleh suami atau istri bersamaan dengan Permohonan Talak apabila suami beragama Islam dan Gugatan Perceraian oleh pihak istri melalui Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri jika para pihak yang berperkara beragama selain islam.

Dari pandangan sosial, **Haditono** berpendapat bahwa anak merupakan makhluk yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya. Selain itu, anak merupakan bagian dari keluarga dan keluarga memberi kesempatan bagi anak untuk belajar tingkah laku yang penting untuk perkembangan yang cukup baik dalam kehidupan bersama.<sup>6</sup> Dari beberapa terminologi tersebut pada prinsipnya, anak adalah pribadi yang memiliki peranan strategis dalam mengemban tanggung jawab masa depan bangsa, namun anak masih memerlukan peranan orang tua dalam memelihara, mendidik dan mengarahkan dalam mencapai kedewasaannya.

Adapun secara biologis anak merupakan hasil dari pertemuan sel telur seorang perempuan yang disebut *ovum* dengan *spermatazoa* dari laki-laki yang

---

<sup>6</sup>Siska Lis Sulistiani, *Kedudukan Hukum Anak* (Bandung: Refika Aditama, 2015), h. 15.

kemudian menjadi *zygot*, lalu tumbuh menjadi janin. Sehingga secara biologis tidak mungkin seorang anak lahir tanpa adanya kontribusi laki-laki dan perempuan. Tetapi hal ini berbeda dari sisi yuridis, seorang anak terkadang lahir tanpa keberadaan seorang ayah, hal ini terdapat dalam undang-undang perkawinan, di mana suatu kelahiran tanpa disertai dengan adanya perkawinan yang sah (anak luar kawin), maka si anak hanya akan memiliki ibu sebagai orang tuanya, sedangkan KUHPerdata menganut prinsip yang lebih tegas bahwa tanpa adanya pengakuan dari kedua orang tuanya, maka si anak dapat dipastikan tidak akan memiliki ayah maupun ibu secara yuridis.

Dalam meneliti kehidupannya di dunia seorang anak memiliki hak mutlak yang tidak dapat diganggu gugat. Orang tua tidak boleh begitu saja mengabaikan lantaran hak-hak anak tersebut termasuk ke dalam salah satu kewajiban orang tua terhadap anak.

Kewajiban orang tua merupakan hak anak. Menurut Abdul Rozak, anak mempunyai hak-hak sebagai berikut:<sup>7</sup>

1. Hak anak sebelum dan sesudah melahirkan.
2. Hak anak dalam kesucian keturunannya.
3. Hak anak dalam pemberian nama yang baik.
4. Hak anak dalam menerima susuan.
5. Hak anak dalam mendapatkan asuhan, perawatan dan pemeliharaan.
6. Hak anak dalam kepemilikan harta benda atau hak warisan demi kelangsungan hidupnya.

---

<sup>7</sup>Neng Djubaedah, dkk, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Hecca Utama, 2005), h. 177.

## 7. Hak anak dalam bidang pendidikan dan pengajaran.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak ditegaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut UU No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasar dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya. Hal ini selaras dengan pengertian anak dalam UUNo. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak dan PP No.54 Tahun 2007 tentang pengangkatan anak. Ketentuan tersebut menerangkan bahwa anak yang masih dalam kandungan pun dikategorikan anak sampai dengan anak berusia 18 tahun.

Adapun Hak-hak anak Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomo 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu sebagai berikut :

### Pasal 1

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.



3. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
4. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
5. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak.
6. Anak Terlantar adalah Anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
7. Anak Penyandang Disabilitas adalah Anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
8. Anak yang Memiliki Keunggulan adalah Anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa tidak terbatas pada kemampuan intelektual, tetapi juga pada bidang lain.
9. Anak Angkat adalah Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga Orang Tua, Wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan Anak tersebut ke dalam lingkungan Keluarga Orang Tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

10. Anak Asuh adalah Anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena Orang Tuanya atau salah Satu Orang Tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang Anak secara wajar.
11. Kuasa Asuh adalah kekuasaan Orang Tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya.
12. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.
13. Masyarakat adalah perseorangan, Keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
14. Pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya.
15. Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
16. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
17. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

18. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, dan walikota serta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan.

#### Pasal 14

1. Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
2. Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:
  - a) bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
  - b) mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
  - c) memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan
  - d) memperoleh Hak Anak lainnya.

### **3. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam**

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam tidak memberikan definisi secara jelas atau pengertian mengenai hal tersebut. Di dalam kedua pasal tersebut disebutkan sebagai berikut: Pasal 41 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berbunyi “Akibat putusnya perkawinan karena perceraian” (a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberi keputusannya; (b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 98 menyatakan pada ayat:

- 1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah usia 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- 2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

- 3) Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.<sup>8</sup>

Jadi, dengan adanya perceraian, *hadhanah* bagi anak yang belum *mumayyiz* dilaksanakan oleh ibunya, sedangkan biaya pemeliharaan tersebut tetap dipikulkan kepada ayahnya. Tanggung jawab ini tidak hilang meskipun mereka bercerai. Hal ini sejalan dengan bunyi pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dimana dijelaskan bahwa suami mempunyai kewajiban untuk memenuhi dan memberi segala kepentingan biaya yang diperlukan dalam kehidupan rumah tangganya. Apabila suami ingkar terhadap tanggungjawabnya, bekas istri yang diberi beban untuk melaksanakan, maka Pengadilan Agama setempat agar menghukum bekas suaminya untuk membayar biaya *hadhanah* sebanyak yang dianggap patut jumlahnya oleh Pengadilan Agama. Jadi, pembayaran itu dapat dipaksakan melalui hukum berdasarkan putusan Pengadilan Agama.

Pengertian hak asuh anak atau Kuasa Asuh dapat kita temukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yaitu BAB I Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat (11) yang berbunyi :”Kuasa Asuh, adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat serta minatnya”.

---

<sup>8</sup>Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama (Dalam Sistem Hukum Nasional)*, (Jakarta: Logos, 1999), h. 189.

Dalam perkara perceraian melalui Pengadilan Agama, maka pengajuan hak asuh terhadap anak-anak oleh pihak isteri biasanya menggunakan ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana diatur di dalam KHI sedangkan bagi yang berperkara di Pengadilan Negeri yaitu yang bukan beragama islam, ketentuan hak asuh anak diberikan oleh Hakim melihat kepentingan anak tersebut.

Secara hukum Islam seorang ibu lebih diutamakan karena dialah yang berhak melakukan pengasuhan dan menyusui anak, mengingat ikatan batin di antara seorang ibu dengan anaknya adalah teramat dekat sekali.

Jadi dengan demikian, walaupun Undang-undang menghendaki hak asuh anak yang belum *mumayyiz* (belum dewasa) jatuh ke tangan ibunya, namun hal itu bukanlah suatu hal yang mutlak, karena Majelis Hakim bisa saja menjatuhkan hak asuh anak yang belum dewasa kepada bapaknya sesuai dengan alasan-alasan yang telah ditentukan oleh peraturan perundangan-undangan. Misal, karena ibunya berkelakuan buruk, seperti judi, zinah, boros dan lain hal sebagainya.

Dengan demikian pertimbangannya, jika sang ibu tidak mampu memberikan jaminan dalam hal pemenuhan kepentingan akan pemeliharaan anak, maka wajar halnya apabila hak asuh anak tersebut diberikan kepada bapak. Secara legalitaspun hal ini telah dijamin sehingga kedudukan hukum anak tersebut tetap dilindungi. Cakap atau tidaknya seorang ayah atau ibu untuk mendapatkan hak asuh anak selalu menjadi perdebatan di Pengadilan karena sampai saat ini belum ada standar yang pasti mengenai hak kecakapan tersebut. Kemudian hakim meminta pendapat atau keterangan dari anak saudara terdekat yang mengetahui

perihal perceraian orang tersebut, untuk nantinya diputuskan oleh Hakim saja yang berhak mendapatkan hak asuh anak tersebut.

Pasal 3 Keputusan Presiden No.36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konveksi Tentang Hak-hak Anak) menyatakan: “Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau legislative, kepentingan anak adalah merupakan pertimbangan utama”.<sup>9</sup>

Menurut hakim positif Negara, bisa saja hak asuh anak di bawah umur yang seharusnya diberikan kepada ibu jatuh ke tangan bapaknya, melalui proses pengadilan yang sah. Kondisi ini diatur di dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dimana hak asuh anak hanya bisa diberikan kepada pihak ibu atau bapaknya saja.

#### **B. Dasar Hukum Hadhanah**

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa pemeliharaan anak merupakan tanggung jawab kedua orang tua (suami istri). Untuk masalah biaya pemeliharaan dan pendidikan anak merupakan tanggung jawab ayahnya (suami), seperti halnya firman allah swt :

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ  
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا  
لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ

<sup>9</sup>Pasal 3 Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-hak Anak)

أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ  
تَسْرِضُوهُمَا أَوْلَدَكُمُ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Terjemahnya:

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi Makan dan Pakaian kepada Para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Jangan seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah dan Maha melihat apa yang kamu kerjakan.” (al-Baqarah : 233)

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنثًا وَيَهَبُ لِمَنْ  
يَشَاءُ الذَّكَورَ ﴿٢٣٤﴾ وَيُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ

قَدِيرٌ ﴿٢٣٥﴾

Terjemahnya:

“Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki. “atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa) yang dikehendaki-Nya, dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa.”



Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa *hadhanah* adalah salah satu kewajiban bagi kedua orang tua yang mendapatkan hak tersebut, pengabaian terhadap anak adalah suatu penganiayaan terhadap anak tersebut.

### **C. Syarat-syarat Hadhanah**

Masalah yang paling pokok dalam pemeliharaan anak adalah syarat-syarat orang yang akan menjadi *hadhin*. Karena sifat seorang pengasuh akan berpengaruh kuat terhadap anak yang akan menjadi asusahannya, Seorang *hadhinah* (ibu asuh) yang menangani dan menyelenggarakan kepentingan anak kecil yang diasuhnya, yaitu adanya kecukupan dan kecakapan. Kecukupan dan kecakapan yang memerlukan syarat-syarat tertentu. Jika syarat-syarat tertentu ini tidak terpenuhi satu saja maka gugurlah kebolehan menyelenggarakan *hadhanahnya*.<sup>10</sup>

Syaratnya yaitu :<sup>11</sup>

1. Yang melakukan hadhanah hendaklah sudah balig berakal, tidak terganggu ingatannya, sebab hadhanah itu merupakan pekerjaan yang penuh tanggung jawab. Oleh sebab itu, seorang ibu yang mendapat gangguan jiwa atau gangguan ingatan tidak layak melakukan tugas hadhanah. Ahmad bin Hanbal menambahkan agar yang melakukan hadanah tidak mengidap penyakit menular.

---

<sup>10</sup>Satria Effendi M. Zein dan Said Agil Al Munawar, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2004), h. 172.

<sup>11</sup>Satria Effendi M. Zein dan Said Agil Al Munawar, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2004), h. 172-173.

2. Mempunyai kemampuan dan kemauan untuk memelihara dan mendidik *mahdun* (anak yang diasuh), dan tidak terikat dengan suatu pekerjaan yang bisa mengakibatkan tugas hadanah menjadi terlantar.
3. Seorang yang melakukan hadanah hendaklah dapat dipercaya memegang amanah, sehingga dengan itu dapat lebih menjamin pemeliharaan anak. Orang yang rusak akhalknya tidak dapat memberikan contoh yang baik kepada anak yang diasuh, oleh karena itu ia tidak layak melakukan tugas tersebut.
4. Jika yang melakukan hadanah itu ibu kandung dari anak yang akan diasuh, disyaratkan tidak kawin dengan lelaki lain. Dasarnya adalah penjelasan Rasulullah bahwa seorang ibu hanya mempunyai hak hadanah bagi anaknya selama ia belum menikah dengan lelaki lain (HR. Abu Daud). Adanya persyaratan tersebut disebabkan kekhawatiran suami kedua tidak merelakan istrinya disibukkan mengurus anaknya dari suami pertama. Oleh karena itu, seperti disimpulkan ahli-ahli fiqih, hak hadanahnya tidak menjadi gugur jika ia menikah dengan kerabat dekat si anak, yang memperlihatkan kasih sayang dan tanggung jawabnya.

Demikian pula hak hadanah tidak gugur jika ia menikah dengan lelaki lain yang rela menerima kenyataan. Hal itu terjadi pada diri Ummu Salamah, ketika ia menikah dengan Rasulullah, anaknya dengan suami pertama selanjutnya tetap dalam asuhannya (HR. Ahmad). Berdasarkan kenyataan ini Ibnu Hazmin berpendapat tidak gugur hak hadanah seorang ibu dengan

menikahny dia dengan lelaki lain, kecuali jika suami kedua itu jelas menolaknya.

5. Seseorang yang melakukan hadanah harus beragama islam. Seorang nonmuslim tidak berhak dan tidak boleh ditunjuk sebagai pengasuh. Tugas mengasuh termasuk ke dalamnya usaha mendidik anak menjadi muslim yang baik, dan hal itu menjadi kewaiban mutlak atas kedua orang tua.

Para ahli fiqih mendaarkan kesimpulan terebut pada ayat 6 surah At-Tahrim yang mengajarkan agar memelihara diri dan keluarganya dari siksaan api neraka. Untuk tujuan itu perlu pendidikan dan pengarahan dari waktu kecil. Tujuan tersebut akan sulit terwujud apabila yang mendampingi atay yang mengasuhnya bukan seorang muslim.

Akan tetapi ulama empat mazhab berpendapat mengenai apabila si ibu telah menikah lagi dengan suami yang barunya maka hak asuhnya menjadi gugur. Akan tetapi jika laki-laki tersebut memiliki kasih sayang kepada si anak. Maka hak asuhan bagi ibu tersebut tetap ada.

Imamiyah berpendapat : hak asuhan bagi ibu gugur secara mutlak karena perkawinannya dengan laki-laki lain, baik suaminya itu memiliki kasih sayang kepada anak tersebut maupun tidak.

Hanafi, Syafi'i, Imamiyah, Hanbali berpendapat : apabila ibu si anak bercerai pula dengan suaminya yang kedua, maka larangan bagi haknya untuk mengasuh anak di cabut kembali, dan hak itu dikembalikan sesudah sebelumnya menjadi gugur karena perkawinannya dengan laki-laki kedua itu.

Sedangkan Maliki, Mengatakan hak asuhnya tidak bisa kembali dengan adanya perceraian tersebut.<sup>12</sup>

#### ***D. Pihak-Pihak yang Berhak dalam Hadhanah***

##### **1. Menurut Fikih**

Seorang anak pada permulaan hidupnya sampai pada umur tertentu, memerlukan orang lain untuk membantunya dalam kehidupannya, seperti makan, pakaian, membersihkan diri, bahkan sampai kepada pengaturan bangun dan tidur. Oleh karena itu, orang yang menjaganya perlu mempunyai rasa kasih sayang, kesabaran, dan mempunyai keinginan agar anak itu baik (saleh) di kemudianhari. Di samping itu juga, ia harus mempunyai waktu yang cukup pula untuk melakukan tugas itu.<sup>13</sup>

Ulama berbeda pendapat siapa yang paling berhak mengasuh anak setelah ibu kandung atau urutan hak asuh anak jika ternyata ada penyebab yang menghalangi ibu kandung untuk mendapatkan hak asuhnya. Perbedaan pendapat ini disebabkan tidak adanya dalil *qath'i* yang secara tegas membahas masalah ini. Hanya saja keempat imam madzhab lebih mendahulukan kalangan kerabat dari pihak ayah dalam tingkat kerabatan yang sama (misalnya mendahulukan nenek dari pihak ibu dari pada nenek pihak ayah).<sup>14</sup>

Urut-urutan prioritas orang yang berhak mengasuh anak, menurut ulama fikih adalah sebagai berikut:

---

<sup>12</sup> Muhammad jawad Mughniyyah, *Fikih Lima Mazhab* (Jakarta: Lentra, 2006), h. 417.

<sup>13</sup> Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2013), h. 221-222.

<sup>14</sup> <http://aliranim.blogspot.com/2012/04/pengertian-dasar-hukum-dan-syarat.html>

a. **Kalangan Mazhab Hanafi** berpendapat bahwa orang yang paling berhak mengasuh anak adalah:

1. Ibu kandungnya sendiri
2. Nenek dari pihak ibu
3. Nenek dari pihak ayah
4. Saudara perempuan (kakak perempuan)
5. Bibi dari pihak ibu
6. Anak perempuan saudara perempuan
7. Anak perempuan saudara laki-laki
8. Bibi dari pihak ayah.<sup>15</sup>

b. **Kalangan Mazhab Maliki** berpendapat bahwa urutan hak asuh anak dimulai dari:

1. Ibu kandung
2. Nenek dari pihak ibu
3. Bibi dari pihak ibu
4. Nenek dari pihak ayah
5. Saudara perempuan
6. Bibi dari pihak ayah
7. Anak perempuan dari saudara laki-laki
8. Penerima wasiat
9. Dan kerabat lain (ashabah) yang lebih utama.

---

<sup>15</sup>Muhammad Uwaidah dan Syaikh Kamil Muhammad, *Fiqih Wanita* (Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2004), h. 456

c. **Kalangan Mazhab Syafi'i** berpendapat bahwa urutan hak asuh anak dimulai pada:

1. Ibu kandung
2. Nenek dari pihak ibu
3. Nenek dari pihak ayah
4. Saudara perempuan
5. Bibi dari pihak ibu
6. Anak perempuan dari saudara laki-laki
7. Anak perempuan dari saudara perempuan
8. Bibi dari pihak ayah
9. Dan kerabat yang masih menjadi mahram bagi si anak yang mendapat bagian warisan ashabah sesuai dengan urutan pembagian harta warisan. Pendapat Mazhab Syafi'i sama dengan pendapat mazhab Hanafi.<sup>16</sup>

d. **Kalangan Mazhab Hambali** berpendapat bahwa hak anak asuh dimulai dari:

1. Ibu kandung
2. Nenek dari pihak ibu
3. Kakek dan ibu kakek
4. Bibi dari kedua orang tua
5. Saudara perempuan seibu
6. Saudara perempuan seayah

---

<sup>16</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh Juz VII*, (Damaskus: Daar Al-Fikr, 1984), h. 683.

7. Bibi dari ibu kedua orangtua
8. Bibinya ibu
9. Bibinya ayah
10. Bibinya ibu dari jalur dari jalur ibu
11. Bibinya ayah dari jalur ibu
12. Bibirnya ayah dari pihak ayah
13. Anak perempuan dari saudara laki-laki
14. Anak perempuan dari paman ayah dari pihak ayah
15. Kemudian kalangan kerabat dari urutan yang paling dekat.

Apabila saudara perempuannya pun dianggap tidak layak maka hak hadhananya pindah ke pihak laki-laki dengan urutan prioritas sebagai berikut:

- a. Ayah
- b. Kakek yang terdekat
- c. Saudara seayah dan seibu
- d. Saudara lelaki ataupun kerabat lainnya dari pihak ayah dimulai dari jarak yang paling dekat.

Kalau kakek ini meninggal tanpa menunjuk satu seorang penerima wasiat untuk mengasuh anak tersebut, maka asuhan beralih pada kerabat-kerabat anak berdasarkan urutan waris yang telah di jabarkan diatas. Kerabat yang paling dekat menjadi penghalang bagi kerabat yang paling jauh. Bila anggota keluarga yang berhak itu jumlahnya berbilang dan sejajar, semisal nenek dari pihak ayah dengan

bibi dari pihak ibu, maka dilakukan undian jika mereka ingin mengasuh. Orang yang namanya keluar sebagai pemenang untu mengasuh anak tersebut.<sup>17</sup>

Jika para wali berdasarkan hukum ini tidak ada juga, maka hakim atau pengadilan menunjuk orang yang akan melakukan hadhanah sekaligus menjadi walinya.

Dengan demikian jelas bahwa anak yang belum dewasa tidak dapat mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum karena itu segala perbuatan yang menyangkut kepentingan anak tetap menjadi tanggung jawab orang tua.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas terlihat bahwa hak utama memelihara anak adalah dari pihak ibu, setelah itu nenek dari pihak ibu dan seterusnya. Ini berarti bahwa dalam soal kasih sayang terhadap anak umumnya dimiliki oleh ibu. Kendati dalam Islam berkewajiban mencari nafkah dibebankan kepada ayah, namun keutamaan memelihara anak bagi pihak ibu tidaklah bersifat mutlak, sebab dalam kasus-kasus tertentu ada ayang yang lebih baik dari ibu dalam mengasuh dan mendidik anak mereka.

---

<sup>17</sup>Yaswirman, *Hukum Keluarga Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrenial Minangkabau* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h. 246.



## 2. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KHI

Dalam pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan:<sup>18</sup>

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana terjadi perselisihan mengenai pengurusan anak-anak Pengadilan memberi keputusan.
- b. Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan anak dan pendidikan yang diperlukan anak itu: bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (a) anak yang belum mumayiz berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:

1. Wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu,
2. Ayah,
3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah,

---

<sup>18</sup>UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2007), h. 16-17.

4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan,
5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu,
6. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.<sup>19</sup>

#### ***E. Masa Hadhanah***

Dalam literatur fiqih disebutkan dua periode bagi anak dalam kaitannya dengan *hadhanah*, yaitu masa sebelum *mumayyiz*, dan masa sesudah *mumayyiz*, periode sebelum *mumayyiz* adalah dari waktu lahir sampai usia menjelang tujuh tahun atau delapan tahun. Pada masa tersebut pada umumnya seorang anak belum lagi *mumayyiz* atau belum bisa membedakan antara yang bermanfaat dan yang berbahaya bagi dirinya.

Periode yang kedua yaitu periode *mumayyiz*, yaitu masa dimana usia anak tujuh tahun sampai menjelang balik berakal. Pada masa ini seorang anak secara sederhana telah mampu membedakan mana yang berbahaya dan mana yang bermanfaat bagi dirinya.

Beberapa ulama mazhab berselisih pendapat mengenai masa asuh anak, karena didalam alquran tidak terdapat ayat-ayat dan hadis yang menerangkan tentang masa *hadhanah* dan juga kapan berakhirnya masa *hadhanah* seorang anak akibat perceraian, perbedaan tersebut diantara seperti:<sup>20</sup>

Imam Syafi'i berpendapat, tidak ada batasan tertentu bagi asuhan. Anak tetap tinggal bersama ibunya sampai dia bisa menentukan pilihan apakah tinggal

---

<sup>19</sup>Abdurraman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007), h.138.

<sup>20</sup>Muhammad jawad Mughniyyah, *Fikih Lima Mazhab* (Jakarta: Lentra, 2006), h. 417-418.

bersama ibunya atau ayahnya. Jika si anak sudah samapai pada tingkat ini, dia disuruh memilih apakah bersama ibu atau ayahnya.

Imam Hanafi berpendapat, bahwa masa asuhan tujuh tahun untuk laki-laki, dan sembilan tahun untuk perempuan. Mereka menganggap bagi perempuan lebih lama, sebab agar dia dapat menirukan kebiasaan-kebiasaan kewanitaan dari perempuan (ibu) yang mengasuhnya.<sup>21</sup>

Imam maliki berpendapat, bahwa masa asuhan, anak laki-laki adalah sejak dilahirkan hingga baligh, sedangkan anak perempuan hingga ia menikah.

Imam Hambali berpendapat, bahwa masa asuhan anak laki-laki dua tahun, sedang anak perempuan tujuh tahun, sesudah itu si anak disuruh memilih apakah tinggal bersama ibu atau ayahnya, lalu si anak tinggal bersama orang yang dipilihnya itu.<sup>22</sup>

Berdasarkan pendapat-pendapat para ulama di atas, tampak bahwa tidak ada ketentuan-ketentuan yang jelas mengenai masa pengasuhan anak (hadhanah). Pada umumnya para fukaha sepakat usia pengasuhan anak, dibatasi sampai anak tersebut sudah mencapai usia mumayyiz.

#### ***F. Upah Hadhanah***

Upah mengasuh anak, sama seperti upah menyusui, tidak menjadi hak seorang ibu sepanjang statusnya masih sebagai istri ataupun sedang menjamin masa iddah. Sebabnya, mereka telah menerima nafkah secukupnya yang diwajibkan bagi masing-masing, baik sebagai istri maupun sebagai (mantan) istri yang sedang menjalani masa iddah. Perempuan selain ibunya boleh menerima

<sup>21</sup> Slamet Abidin, *Fikih Munakahat 2* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hh. 185.

<sup>22</sup> Muhammad jawad Mughniyyah, *Fikih Lima Mazhab* (Jakarta: Lentra, 2006), h. 418.

upah hadhanah, sejak saat menangani hadhananya, seperti halnya perempuan penyusu yang bekerja dengan bayaran atau upah.<sup>23</sup>

Seperti halnya ayah wajib membayar upah penyusunan dan hadhanah ia juga wajib membayar sewa rumah atau perelengkapannya. Jika sekiranya si ibu tidak punya rumah sendiri sebagai tempat mengasuh anak kecilnya. Ayah juga wajib membayar gaji pembantu rumah tangga atau menyediakan pembantu tersebut jika si ibu membutuhkannya dan ayah mampu membiayainya.

Hal ini bukan termasuk ke dalam bagian nafkah khusus bagi anak kecil seperti makan, minum, tempat tidur, obat-obatan dan keperluan lain-lain yang pokok yang sangat dibutuhkanya. Tetapi gaji ini hanya wajib di keluarkan di saat hadhinah (ibu pengasuh) menangani asuhannya. Gaji upah ini menjadi hutang yang ditanggung oleh ayah dan baru bisa terlepas dari tanggungan ini kalau di lunasi atau dibebaskan.

Para ulama berpendapat mengenai upah mengasuh adalah sebagai berikut: Syafi'i dan Hambali : wanita yang mengasuh berhak atas upah bagi pengasuhan yang diberikannya, baik dia yang berstatus ibu sendiri maupun orang lain bagi anak itu. Sedangkan Syafi'i mengatakan bahwa, apabila anak yang di asuh itu mempunyai harta sendiri, maka upah tersebut dibayar melalui harta anak tersebut, sedangkan bila tidak upah itu merupakan tanggung jawab ayahnya atau orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada si anak.

Maliki dan Imamiyah : wanita pengasuh tidak berhak atas upah bagi pengasuhan yang diberikanannya, tetapi Imamiyyah mengatakan bahwa si ibu

---

<sup>23</sup>Muhammad Bagir Al Habsyi, *Fiqh Praktis Menurut Al-Quran, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama* (Bandung: PT. Mizan 2002), h. 239-240.

berhak atas upah, jika anak yang di susuinya itu mempunyai harta maka orang yang menyusuinya tersebut di bayarkan upahnya melalui harta anak tersebut. Tetapi kalau tidak punya, upah itu menjadi tanggungan ayahnya jika ayahnya orang mampu.

Hanafi : pengasuh wajib memperoleh upah jika sudah tidak ada lagi ikatan perkawinan antara ibu dan bapak si anak. Upah yang mengasuh wajib di bayarkan dari harta si anak bila ia mempunyai harta dan bila tidak upah itu menjadi tanggungan orang yang berkewajiban memberi nafkah kepadanya.

#### **G. Batasan Waktu Hadhanah**

Hadhanah berhenti bila si anak kecil tersebut sudah tidak memerlukan lagi pelayanan perempuan, telah dewasa dan dapat berdiri sendiri, serta telah mampu untuk mengurus sendiri kebutuhan pokoknya seperti: makan sendiri, berpakaian sendiri, mandi sendiri. Dalam hal ini tidak ada batasan tertentu tentang waktu habisnya.<sup>24</sup>

Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz (belum dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk sampai kira-kira 12 tahun). Menjadi hak ibunya, dan jika anak sudah di anggap mumayyiz, sudah dapat mandiri dalam melakukan keperluan sehari-hari berkenaan dengan makan minumannya, cara membersihkan diri, berpakaian dan sebagainya, maka ia di persilahkan memilih antara ikut dengan ibu atau ayahnya.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup>Muhammad Bagir Al Habsyi, *Fiqh Praktis Menurut Al-Quran, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama* (Bandung: PT. Mizan 2002), h. 418.

<sup>25</sup>Muhammad Bagir Al Habsyi, *Fiqh Praktis Menurut Al-Quran, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama* (Bandung: PT. Mizan 2002), h. 241.

Apabila si anak dapat membedakan ini dan itu, tidak membutuhkan pelayanan perempuan dan dapat memenuhi kebutuhan pokoknya sendiri, maka hadhanah telah habis. Fatwa dari mazhab Hanafi dan lain-lainnya yaitu: masa hadhanah berakhir habis, bilamana si anak berumur 7 tahun kalau laki-laki dan 9 tahun yang perempuan.

Apabila anak kecil laki-laki memilih ibunya, maka ia dapat tinggal kepadanya dimalam hari, dan ayah dapat mengambilnya disiang hari untuk belajar atau bekerja. Karena yang pokok adalah nasib anak tersebut.

Akan tetapi jika anak kecil laki-laki memilih ayahnya, maka ia dapat tinggal padanya dimalam atau siang hari. Dan ayah tidak boleh melarangnya untuk mengunjungi ibunya. Karena melarang mengunjungi ibunya berarti mendorong anak durhaka dan memutuskan hubungan kekeluargaan dengan ibunya.

Jika si anak sakit maka ibunya yang berhak untuk merawatnya, sebab ketika ia sakit dianggap seperti anak kecil yang memerlukan orang lain untuk mengurus dirinya. Maka dari itu ibunyalah yang paling berhak untuk mengurus dirinya.

Namun apabila si anak ini perempuan, lalu ia memilih salah seorang dari ibu dan ayahnya, maka ia dapat tinggal padanya siang dan malam. Dan ia tidak boleh dilarang mengunjungi orangtuanya yang lain asalkan tidak lama. Karena suami istri yang telah bercerai yang satu dilarang untuk tinggal lama di rumah yang lain.

Jika si anak perempuan sakit maka ibunyalah yang berhak merawatnya dirumahnya sendiri. dan salah seorang dari ibu atau bapaknya sakit, sedang anak berada di tangan yang lain maka ia tidak boleh di larang untuk menjenguknya dan menghadirinya ketika kematiannya.

Sedangkan masalah tempat untuk tempat tinggal si anak boleh bebas memilih antara ayah dan ibunya menurut kemauannya seperti kesukaanya memilih tempat makan dan minum.



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### ***A. Jenis dan Lokasi Penelitian***

###### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang yang dapat diamati. Secara sederhana, penelitian lapangan digunakan untuk memperjelas kesesuaian antara teori dan praktik.

###### **2. Lokasi Penelitian**

Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan yang berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan penyusunan, maka penulis melakukan penelitian dengan memilih lokasi di Kabupaten Gowa tepatnya di Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa.

##### ***B. Pendekatan Penelitian***

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Normatif Empiris Perundang-Undangan (*statue appach*) dan studi putusan. Pendekatan Perundang-Undangan merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengaji dan menganalisis asas dan sinkronisasi semua Perundang-Undangan (baik secara horizontal maupun vertikal) serta peraturan lainnya yang bersangkutan paut dengan masalah yang diteliti. Sedangkan pendekatan studi putusan untuk mempelajari suatu individu, kelompok, institusi, dan masyarakat tertentu tentang latar belakang keadaan atau faktor-faktor dan interaksi-interaksi sosial yang terjadi di dalamnya.



### **C. Sumber Data**

Sumber data yang di peroleh dari hasil wawancara langsung dengan pihak yang terkait sehubungan penelitian ini di bagi menjadi 2 jenis data yaitu:

1. Data primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pakar, narasumber dan pihak-pihak yang terkait dengan penulisan skripsi ini.

2. Data sekunder

Ialah data yang diperoleh bukan dari sumber asli yang memuat informasi atau data tersebut.<sup>1</sup>

Sumber data sekunder adalah Perundang-undangan berupa catatan harian, memori atau catatan penting lainnya. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

---

<sup>1</sup>Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 206.

#### ***D. Metode Pengumpulan Data***

Untuk menjangkau data yang diperlukan sebagai analisis dalam penelitian ini maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Metode penelitian ke perpustakaan (*library research*)

Metode penelitian ke perpustakaan merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan sejumlah data dengan jalan membaca dan menelusuri literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

2. Metode Penelitian Lapangan (*field research*)

Metode Penelitian Lapangan (*field research*) merupakan penelitian yang dilakukan dilapangan dengan pengamatan lapangan yang ditepuh dengan cara:

- a. Wawancara

Merupakan proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan secara detail.

- b. Dokumentasi

Sejumlah besar faktor dan data tersimpan dalam bahasa yang berbentuk dokumen. Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, catatan harian, cenderamata, foto dan lain sebagainya. Sifat utama ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi ruang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam. Teknik ini digunakan untuk

mengetahui sejumlah data tertulis yang ada dilapangan yang relevan dengan pembahasan penelitian.

#### ***E. Instrumen Penelitian***

Instrumen penelitian merupakan hal yang penting untuk menentukan kualitas data dan kualitas penelitian sehingga untuk menentukan instrumen pengumpulan data diperlukan akurasi dan presisi.

#### ***F. Teknik Pengelolaan dan Analisis***

##### **1. Teknik pengolahan data**

Pengolahan data secara sederhana diartikan sebagai proses mengartikan data-data lapangan sesuai dengan tujuan, rancangan dan sifat penelitian. Metode pengolahan data dan penelitian ini adalah:

- a. Editing data adalah pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan untuk mengetahui relevansi (hubungan) dan keabsahan data yang akan dideskripsikan dalam menemukan jawaban pokok permasalahan. Hal ini dilakukan dengan tujuan memperbaiki kualitas data serta menghilangkan keraguan atas data yang diperoleh dari hasil wawancara.
- b. Koding data adalah penyesuaian data yang diperoleh dalam melakukan penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dengan pokok pangkalan pada permasalahan dengan cara memberi kode-kode tertentu pada tiap data tersebut.

## 2. Analisis Data

Dalam menganalisis data yang telah disajikan, karena data tersebut bersifat tekstual maka penulis menggunakan analisis isi dalam pengertian analisis kualitatif. Yaitu data yang diperoleh baik yang sifatnya proses prosedural.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### ***A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian***

Pengadilan Agama Sungguminasa menempati posisi penting dan strategis karena berada terletak di Kabupaten yang merupakan salah satu daerah kerajaan terbesar di Indonesia yang berbatasan langsung dengan kota metropolitan Makassar, yaitu Kabupaten Gowa. Di samping itu pula, kalau dilihat dari perspektif jumlah penduduknya, Kabupaten Gowa termasuk kabupaten terbesar ketiga di Provinsi Sulawesi Selatan setelah Kota Makassar dan Kabupaten Bone.

Pengadilan Agama Sungguminasa yang wilayah yurisdiksinya meliputi 18 Kecamatan dan 169 Kelurahan/Desa dengan letak geografis antara 119.30' sampai dengan 120.12' Bujur Timur dan 05.10' sampai dengan 05.40' Lintang Selatan dengan luas wilayah 1.883.33 km<sup>2</sup>.

Disamping itu pula, Kabupaten Gowa merupakan daerah penyanggah utama ibu kota provinsi Sulawesi Selatan, juga berbatasan langsung dengan beberapa kota di Sulawesi Selatan, di antaranya Kabupaten sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Maros, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bulukumba, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Takalar serta sebelah barat bertasan dengan Kota Makassar.

Jumlah penduduk Kabupaten Gowa berdasarkan data BPS Kabupaten Gowa tahun 2007 berjumlah 586.069 jiwa dan berdasarkan data yang diperoleh

dari Departemen Agama pemeluk Agama islam di Kabupaten Gowa adalah memiliki persentase sebesar 99,15 % dengan perincian sebagai berikut:

➤ Islam	= 581.855
➤ Kiten Protestan	= 2.435
➤ Kristen Katolik	= 1.356
➤ Hindu	= 154
➤ Budha	= 269

Melihat situasi dan kondisi volume kerja terutama jumlah perkara yang masuk mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Di samping itu pula jumlah personil pegawai Pengadilan Agama Sungguminasa walaupun terasa masih kurang, tetapi sudah cukup mengakselerasi pelaksanaan tugas-tugas yang diemban oleh Pengadilan Agama Sungguminasa.<sup>1</sup>

### **1). Jumlah penduduk dan Mata pencaharian**

Kabupaten Gowa yang mempunyai jumlah penduduk sebanyak 586.069 jiwa yang bermata pencaharian sebagai berikut :

a. Pertanian	26.20%
b. Perdagangan	21.10%
c. Peternakan	11.38%
d. Pertambangan	14.30%
e. Industri	11.22%
f. Pariwisata	21%

---

<sup>1</sup>Kantor Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupate Gowa"Profil Kantor Pengadilan Agama Sungguminasa", 3 September 2018

Peningkatan jumlah penduduk yang cukup tinggi dapat menimbulkan benturan-benturan kebutuhan dan kepentingan sehingga berakibat meningkatnya kasus-kasus rumah tangga ini dapat tergambar dengan peningkatan volume perkara yang masuk di Pengadilan Agama Sungguminasa dalam kurun waktu 7 tahun terakhir.

**1. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sungguminasa meliputi:**

- a. Jumlah Kecamatan dan Kelurahan / Desa seluruh wilayah hukum Pengadilan Agama Sungguminasa adalah 18 Kecamatan yang terdiri dari 44 Kelurahan dan 133 Desa
- b. Nama Kecamatan dan kelurahan/Desa serta radius/jaraknya ke Pengadilan Agama Sungguminasa, yaitu:

No .	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jarak (Km)	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Bontonompo	Tamallayang	16.00	
2	Bontonompo Selatan	Pabundukang	30.00	
3.	Bajeng	Kalebajeng	12.00	
4.	Bajeng Barat	Borimatangk asa	15.80	
5.	Pallangga	Mangalli	2.45	
6.	Barombong	Kanjilo	6.50	
7.	Sombaopu	Sungguminas	0.00	Ibukota Kabupaten

		a		
8.	Bontomarannu	Borongloe	9.00	
9.	Pattalassang	Pattalassang	13.00	
10	Parangloe	Lanna	27.00	
11.	Majunu	Moncongloe	20.00	
12	Tinggimoncong	Malino	59.00	
13	Tombolo Pao	Tamaona	90.00	
14	Parigi	Majannang	70.00	
15	Bungaya	Sapaya	46.00	
16	Bontolempangan	Malakaji	63.00	
17	Tompobulu	Malakaji	125.00	Melalui/via Kab.Jeneponto
18	Biring Bulu	Lauwa	140.00	

## 2. Penduduk

Penduduk Kabupaten Gowa berjumlah 617.317 orang terdiri dari:

### a. Jenis kelamin

- Laki-laki = 305.202 orang
- Perempuan = 312.115 orang

### b. Agama

- Islam = 590.209 orang
- Kristen Katolik = 1.356 orang
- Kristen Protestan = 2.435 orang



- Hindu = 154 orang
- Budha = 269 orang

### 3. Data Sumber Daya Manusia Pengadilan Agama Sungguminasa

#### 1. Daftar Nama Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa

NO	NAMA	GOLONGAN	PENDIDIKAN	TAHUN MENDUDUKI
		TERAKHIR	TERAKHIR	JABATAN
1.	K.H. Muh.Saleh Thaha	III	SLTA	1966-1976
2.	K.H. Drs.Muh.Ya'la Thahir	-	SLTA	1976-1982
3.	K.H. Muh.Syahid	-	SLTA	1982-1984
4.	Drs. Andi Syamsu Alam,S.H.	III/d	S.1	1984-1992
5.	Drs. Andi Syaiful Islam Thahir	IV/a	SLTA	1992-1995
6.	Drs. Muh.As'ad Sanusi, S.H.	IV/a	SLTA	1995-1998
7.	Dra. Hj.Rahmah Umar	IV/b	S.1	1998-2003
8.	Drs. Anwar Rahman	IV/b	S.1	2003-2004
9.	Drs. Khaeril R., M.H.	IV/c	S.1	2004-2007
10.	Drs. H.M.Alwi Thaha,S.H.,M.H.	IV/d	S.2	2007-2012
11.	Drs. H. Hasanuddin, M.H.	IV/c	S.2	2012-2015
12.	Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H.	IV/b	S.2	2015 s/d Sekarang

#### **4. KONDISI GEDUNG PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA SAAT INI**

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pembangunan sarana dan prasarana fisik di lingkungan peradilan adalah merupakan salah satu skala prioritas Mahkamah Agung dalam rangka mewujudkan Peradilan yang modern, bermartabat, bermanfaat, dan di cintai masyarakat.

Dalam konteks itu, Kantor Pengadilan Agama Sungguminasa telah dibangun sesuai dengan standar prototype Mahkamah Agung RI sejak tahun 2008. Namun dalam perkembangannya, kondisi bangunan terutama bagian eksteriornya sudah mengalami kerusakan, dimana tegel-tegel pembungkus tiap-tiap pilar sudah banyak yang jatuh-jatuh. Akibatnya bukan hanya mengurangi keindahan gedung dari sisi tampilan luarnya, tetapi juga sangat berbahaya bagi pegawai dan masyarakat yang membutuhkan pelayanan di Kantor Pengadilan Agama Sungguminasa.

Dengan melihat kondisi riil seperti itu, maka di butuhkan adanya perbaikan (rehabilitasi) dengan jalan membongkar tegel pembungkus pilar tersebut kemudian mengganti dengan pemasangan dinding alumunium composite panel (Allucopan). Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan kenyamanan dan kondusifitas pegawai dalam bekerja dan para pihak yang sedang menunggu hukum di Pengadilan Agama Sungguminasa .

Atas hal tersebut di atas dan sesuai dengan kebijakan Ketua Mahkamah Agung RI maka untuk tahun anggaran 2016 Pengadilan Agama Sungguminasa mengusulkan alokasi Anggaran Biaya Tambahan (ABT) untuk kegiatan rehabilitasi gedung kantor Pengadilan Agama Sungguminasa dengan jumlah anggaran seperti terlampir pada TOR dan RAB.

➤ **Foto Gedung Baru Pengadilan Agama Sungguminasa**

1. Alamat Kantor Baru Pengadilan Agama Sungguminasa

Lokasi : Jl. Masjid Raya, Sungguminasa  
Telp. : 0411 - 864298  
Fax. : 0411 - 864298  
Email : *sungguminasa@pta-makasarkota.go.id*

2. Luas Gedung Baru Kantor Pengadilan Agama Sungguminasa:

Luas Tanah : 3.500 M<sup>2</sup>  
Luas Bangunan : 728 M<sup>2</sup>

3. Status Kantor

Di atas tanah seluas 3.500 m2 dengan status Hak pakai No. 00163 atas Mahkamah Agung RI terletak di Jl. Mesjid Raya No, 25 Sungguminasa



***B. Pengaturan pengasuhan anak pasca cerai menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dalam Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa, Gowa Nomor 935/Pdt.G/2016/PA.Sgm)***

Meskipun secara yuridis sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, akan tetapi dengan melihat fakta sebagaimana di atas disesuaikan dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat terhadap hak hadhanah anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama Aries Fauzi As'ad, lahir di Gowa, tanggal 15 Juli 2015 harus dinyatakan ditolak.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang tidak termasuk dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.

Bahwa terhadap anak yang bernama Aries Fauzi As'ad bin Tauffan Imani Muhammad, demi kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak tersebut, maka Majelis Hakim memindahkan hak pengasuhan dan pemeliharaan anak dari Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dan menetapkan anak yang bernama Aries Fauzi As'ad bin Tauffan Imani Muhammad yang lahir pada tanggal 15 Juli 2015 berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat

Rekonvensi selaku ayah kandungnya, hingga anak tersebut mumayyiz atau berumur 12 tahun, dan setelah itu hak opsi diberikan kepada anak tersebut untuk memilih dengan siapa ia akan tinggal sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

Jika berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pelaksanaan pengasuhan anak diurus oleh seorang wali yang ditunjuk. “Ruang lingkup kekuasaan wali yang ditunjuk itu adalah sama dengan kekuasaan yang menjadi tanggung jawab orang tua dari anak tersebut, yaitu meliputi pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bedanya”.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan.

Bahwa untuk upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah berusaha memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui jalan mediasi dengan menunjuk seorang mediator dari Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa (Uten Thahir, S.HI., M.H.) akan tetapi usaha Hakim mediator tersebut tidak berhasil, sebagaimana laporan hasil mediasi tertanggal 24 Januari 2017, selanjutnya pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan terhadap gugatan Penggugat mengenai hadhanah Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membuat kesepakatan mengenai hadhanah akan tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya adalah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berlangsung baik hanya dua bulan, Tergugat memiliki kebiasaan buruk dan sifat yang baru diketahui oleh Penggugat saat perkawinan berlangsung yaitu mabuk, kasar, mengancam dan sering memukul serta sering meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang tidak jelas, meskipun Tergugat bekerja namun sebagian besar penghasilannya dipergunakan tidak untuk kepentingan nafkah anak dan istrinya, tidak lama setelah Penggugat melahirkan anak pertama Tergugat meninggalkan Penggugat dengan alasan bahwa Tergugat tertekan, pada bulan November 2015 Tergugat meninggalkan Penggugat ke Jakarta hingga awal Desember 2015 sehingga Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat hingga bulan Maret 2016, memasuki awal bulan Maret 2016 Tergugat pun memberikan kabar dan ternyata Tergugat menghubungi Penggugat hanya membutuhkan dana untuk dipinjamkan ke Tergugat dan Penggugat meminjamkan dana tersebut yang sesuai diminta oleh Tergugat, pada bulan April 2016 antara Penggugat dengan Tergugat

sudah kembali tinggal bersama, namun ketika bulan September 2016 percetakan kembali sering terjadi, Penggugat pun bertahan karena Penggugat berpikir tidak mungkin Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di samping Penggugat akan merasa malu dan orang tua Penggugat pasti akan lebih terluka melihat anaknya diperlakukan seperti itu yang dilakukan oleh Tergugat, sejak tinggal bersama kembali Tergugat tidak berubah sama sekali bahkan Tergugat sering pulang subuh dan suka minum beralkohol dalam keadaan mabuk bersama rekan-rekan Tergugat di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, kemudian dikarenakan Penggugat sudah tidak kuat lagi menghadapi tingkah laku dan tindakan pemukulan yang masih terulang, perlakuan kasar, ancaman dengan benda tajam seperti badik, dilempar rokok yang masih dalam keadaan menyala. Sikap dari Tergugat tersebut yang menjadikan Penggugat tidak ingin lagi untuk melanjutkan perkawinan dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat yang tidak ingin kembali rukun dengan Tergugat, merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang di antara suami istri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan.

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan.

Menimbang, bahwa dengan berpisahanya Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus 2016 dan tidak saling menghiraukan lagi menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami istri, dan di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan kenyataan hukum dalam persidangan, dengan tanpa melihat siapa yang salah dan siapa yang benar, dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*), sehingga tidak ada harapan lagi kedua belah pihak yang berperkara tersebut untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan mengkaji secara komprehensif kasus dalam perkara ini, dapat diketahui rumah tangga yang sudah hancur berantakan, sehingga dapat dinilai hal tersebut menyebabkan suami atau istri atau kedua-duanya hidup dalam kesusahan, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan penderitaan batin, sehingga hidup tersiksa dalam puncak kesengsaraan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudarat lahir dan batin.

Menimbang, bahwa kalau seorang istri (Penggugat) telah menunjukkan sikapnya yang keras ingin bercerai dengan suaminya (Tergugat) dengan alasan sebagaimana fakta tersebut di atas, dan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami-istri telah berpisah tempat tinggal selama delapan bulan karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak



pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, dan selama persidangan Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga mereka (*onheelbaare tweespalt*), sehingga apabila perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dipaksakan untuk dipertahankan, maka patut diduga hal tersebut hanya akan menimbulkan kemudharatan dan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, terlebih lagi bagi pihak Penggugat.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup mempertahankan perkawinan yang pecah, perceraian adalah jalan untuk mencegah terjadinya kekerasan baik fisik maupun non fisik vide Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sehingga baik Penggugat maupun Tergugat tidak menjadi pelaku atau korban kekerasan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 diangkat suatu kaidah hukum, bahwa sepasang suami istri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan istri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami istri lagi. Hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk diperbaiki lagi, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dan al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21, tidak mungkin dapat dicapai oleh Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan di muka maka Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa hal yang dijadikan pertimbangan dalam memutuskan hukum dalam sengketa hadhanah adalah kemaslahatan anak-anak itu sendiri, bukan kemaslahatan ibu dan ayahnya. Pihak mana yang dipandang layak dan pantas serta dapat menjamin kemaslahatan anak, maka pihak itulah yang harus dinyatakan berhak untuk melakukan hadhanah.

Menimbang, bahwa terbukti Penggugat Rekonvensi telah melaksanakan kewajibannya sebagai ayah kandung dari Aries Fauzi As'ad terhitung sejak tanggal 20 Juli 2015 sampai dengan tanggal 27 November 2016 meliputi: biaya aqiqah, segala keperluan anak termasuk biaya untuk pengasuh anak, dan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah memiliki tabungan di Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Minasa Upa, Kota Makassar dengan

Nomor Rekening 00072-01-50-009397-2 dan saldo terakhir tabungan tersebut bertanggal 15 Maret 2016: Rp 25.200.000,00 (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah), anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi juga sebagai tertanggung dari Polis Asuransi Jiwa dikeluarkan oleh PT. Zurich Topas Life pada tanggal 28 Desember 2016 dengan Nomor Polis 00833905 atas nama Penggugat Rekonvensi sebagai Pemegang Polis.

Menimbang, bahwa terbukti Tergugat Rekonvensi jarang mengurus anaknya dan yang mengurus anaknya adalah babysitter sehingga hal tersebut menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, ketika Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih bersama Tergugat Rekonvensi merokok dan Tergugat Rekonvensi kadang pulang malam dalam keadaan mabuk, setelah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah tempat tinggal, Tergugat Rekonvensi beberapa kali pergi ke tempat hiburan malam, di sana Tergugat Rekonvensi merokok, mabuk-mabukan dan bernesraan dengan laki-laki selain Penggugat Rekonvensi, hal ini menjadi indikasi bahwa Tergugat Rekonvensi tidak amanah dalam menjalankan fungsinya sebagai ibu dengan tidak begitu menghiraukan anaknya dan tidak amanah dan tidak menjaga kehormatannya dengan mabuk di tempat hiburan malam dan tidak amana sebagai istri dengan bernesraan dengan laki-laki selain yang bukan suaminya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang tidak termasuk dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap anak yang bernama Aries Fauzi As'ad bin Tauffan Imani Muhammad, demi kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak tersebut, maka Majelis Hakim memindahkan hak pengasuhan dan pemeliharaan anak dari Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dan menetapkan anak yang bernama Aries Fauzi As'ad bin Tauffan Imani Muhammad yang lahir pada tanggal 15 Juli 2015 berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya, hingga anak tersebut mumayyiz atau berumur 12 tahun, dan setelah itu hak opsi diberikan kepada anak tersebut untuk memilih dengan siapa ia akan tinggal sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa selama masa hak asuh anak tersebut berada di tangan Penggugat Rekonvensi maka hak-hak asasi anak tersebut serta hak-hak Tergugat Rekonvensi sebagai ibunya harus tetap dihormati serta diberi keleluasaan bagi Tergugat Rekonvensi untuk dapat bertemu, bercengkrama dan bermain serta untuk dapat mengajak anak tinggal atau menginap beberapa hari bersama Tergugat Rekonvensi selama kepentingan pendidikan anak tidak terganggu, sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap hak asuh anak yang bernama Aries Fauzi As'ad bin Tauffan Imani Muhammad dinyatakan dikabulkan.

Menimbang, bahwa demi kemaslahatan anak dan dengan memperhatikan petitum subsider Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi serta kebiasaan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama ini yaitu anak



Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi kadang dipelihara oleh orang tua Tergugat Rekonvensi dan kadang dipelihara oleh orang tua Penggugat Rekonvensi, dan tidak terjadinya kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi hanya disebabkan Tergugat Rekonvensi ingin agar hak asuh anak dipegang oleh Penggugat Rekonvensi sedangkan Tergugat Rekonvensi sepakat mengenai poin yang lain berkenaan dengan pembagian waktu mengasuh anak yakni masing-masing seminggu dan nafkah anak ditanggung oleh Penggugat Rekonvensi, sehingga dengan pastinya hak asuh anak dipegang oleh Penggugat Rekonvensi maka dengan memperhatikan aspek jasmani, rohani dan psikologis tumbuh kembang anak, maka Majelis Hakim berpendapat untuk keseimbangan tumbuh kembang anak maka perlu diatur pengasuhan anak secara berkala sampai anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berusia 12 tahun yaitu satu bulan untuk Penggugat dan satu bulan berikutnya untuk Tergugat dan seterusnya sampai anak tersebut berusia 12 tahun (*mumayyiz*), akan tetapi Majelis Hakim menganggap waktu seminggu terlalu cepat dalam mengasuh anak sehingga dikhawatirkan akan berpengaruh pada kesehatan anak tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim pembagian waktu pengasuhan anak secara bergantian yakni satu bulan untuk Penggugat dan satu bulan berikutnya untuk Tergugat dan seterusnya sampai anak tersebut berusia 12 tahun (*mumayyiz*).

Bahwa dengan ditetapkannya hak asuh anak kepada Penggugat Rekonvensi dan ditetapkannya pembagian waktu pengasuhan anak secara bergantian, maka petitum gugatan Penggugat Rekonvensi nomor 5 agar Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan anak tersebut *ic. Aries Fauzi As'ad* kepada Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan ditolak.

### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengenai perceraian telah dikabulkan, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengirim salinan putusan perkara *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat (Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar) serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilaksanakan (Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa) guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

***C. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan hak asuh anak kepada***

***sang ayah Nomor 935/Pdt.G/2016/PA.Sgm***

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan, atas perkara Cerai Gugat dan Gugatan Hadhanah yang diajukan oleh:

**Penggugat**

Nama : S (inisial)  
Usia : 24 Tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : Jalan Majid Raya, Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu  
Kab. Gowa

***MELAWAN***

**Tergugat**

Nama : T (inisial)  
Usia : 21 Tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Alamat : Makassar

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 8 Desember 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa pada tanggal 8 Desember 2016 dengan register Nomor 935/Pdt.G/2016/PA.Sgm, Penggugat pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 8 Maret 2015, bertepatan dengan 17 Jumadil Awal 1436 H., telah dilangsungkan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat di KUA Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, berdasarkan Akta Perkawinan No.: 0123/011/III/2015.
2. Bahwa setelah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan, keduanya bertempat tinggal di Makassar, tepatnya di tempat kediaman orang tua Tergugat.
3. Bahwa kemudian dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, yang saat ini usianya masih di bawah umur, yaitu: Aries Fauzi As'ad, laki-laki, berusia 1 tahun, lahir di Gowa tanggal 15 Juli 2015.
4. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berlangsung baik, rumah tangga tentram dan bahagia namun hal itu berlangsung hanya 2 (dua) bulan, walaupun sekali-kali terjadi percekcoakan, namun oleh Penggugat dengan Tergugat sendiri masih dapat dirukunkan. Bahwa sejak awal perkawinan berlangsung, Tergugat telah memiliki kebiasaan buruk dan sifat yang baru diketahui oleh Penggugat saat perkawinan berlangsung yaitu mabuk, kasar, mengancam dan sering memukul serta sering meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang tidak jelas.
5. Bahwa Penggugat berpikir mengapa Tergugat kadang baik dan kadang kasar. Awalnya Penggugat berpikir positif tentang Tergugat mungkin lelah dengan pekerjaannya. Ternyata semakin hari semakin memburuk dan Penggugat telah mengikuti semua apa yang diinginkan oleh Tergugat tetapi tingkah laku Tergugat terhadap Penggugat tetap seperti itu. Apabila Penggugat memberikan nasehat, Tergugat bukannya tersadar serta mengubah kebiasaan buruknya namun melakukan pemukulan terhadap Penggugat.
6. Bahwa Meskipun Tergugat bekerja, namun sebagian besar penghasilannya dipergunakan tidak untuk kepentingan nafkah anak dan istrinya. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat mulai mengalami percekcoakan, hal ini lebih sering terjadi berawal dari perbedaan cara pandang antara Penggugat dengan Tergugat dalam hal membina rumah tangga, bahkan di sela-sela percakapan antara Penggugat dengan Tergugat ketika sedang membicarakan hal-hal yang umum maupun hal yang prinsipil dalam rumah tangga, percekcoakan dapat saja terjadi bahkan dengan suara yang keras Tergugat memaki-maki yang tidak sewajarnya, berbicara keras dan memukul Penggugat, yang dianggap tidak becus mengurus rumah tangga.
7. Bahwa namun demikian Penggugat selalu berusaha untuk mengalah demi mempertahankan keutuhan rumah tangga, dan menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 UU No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

8. Bahwa tidak lama setelah Penggugat melahirkan anak pertama dari hasil perkawinan kurang lebih 10 hari setelah Penggugat melahirkan, untuk pertama kalinya Tergugat meninggalkan Penggugat dengan alasan bahwa Tergugat tertekan. Namun setelah 7 (tujuh) hari meninggalkan Penggugat, Tergugat kembali mengirimkan sebuah pesan melalui facebook dan instagram Penggugat, dalam pesan tersebut menyampaikan alasan mengapa Tergugat meninggalkan Penggugat yakni bahwa Tergugat hanya ingin bebas dengan kebiasaan buruknya. Belum lagi pesan melalui Instagram Penggugat, mengirimkan sebuah pesan meminta untuk dikirimkan uang dan Tergugat melarang Penggugat untuk memberi tahu kepada keluarga Tergugat, apabila Penggugat memberi tahu kepada keluarga Tergugat, maka Tergugat tidak akan pernah pulang lagi ke kediaman dimana tempat Penggugat tinggal.
9. Bahwa pada bulan November tahun 2015 Tergugat meninggalkan Penggugat ke Jakarta dengan alasan yang tidak jelas. Hingga awal Desember 2015 Tergugat tidak pernah pulang ke rumah dimana Penggugat tinggal. Sehingga Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat hingga bulan Maret 2016 Tergugat tidak pernah memberikan kabar kepada Penggugat baik komunikasi lewat telepon maupun menjemput Penggugat.
10. Bahwa sebagai ibu dan istri yang baik, Penggugat dengan penuh tanggung jawab selalu mencurahkan kasih sayang, perhatian, cinta, dan baktinya kepada kepada anak dan suami, serta mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya, sebagaimana dimaksud Pasal 33 UU No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 83 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam.
11. Bahwa memasuki awal bulan Maret 2016, Tergugat pun memberikan kabar dengan menghubungi Penggugat setelah sekian lama Tergugat tidak memiliki kabar, awalnya Tergugat mengatakan kepada Penggugat rindu untuk bertemu, tidak lama kemudian Penggugat memberikan kabar kepada Tergugat untuk ketemu, dan ternyata Tergugat menghubungi Penggugat hanya membutuhkan dana untuk dipinjamkan ke Tergugat dengan alasan ada suatu barang yang telah dipesan oleh Tergugat dan harus segera dibayar. Dan Tergugat memohon untuk segera dipinjamkan, dan Penggugat meminjamkan dana tersebut yang sesuai diminta oleh Tergugat.
12. Bahwa kemudian pada bulan April 2016 antara Penggugat dengan Tergugat sudah kembali tinggal bersama, namun tidak lama kemudian percekcoakan yang terus menerus dan bahkan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali mulai sering terjadi, yaitu terjadi ketika bulan September 2016, Penggugat pun bertahan karena Penggugat berpikir tidak mungkin Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di samping Penggugat akan merasa malu dan orang tua Penggugat pasti akan lebih terluka melihat anaknya diperlakukan seperti itu yang dilakukan oleh Tergugat.  
Bahwa sejak tinggal bersama kembali Tergugat tidak berubah sama sekali. Bahkan Tergugat sering pulang subuh dan suka minum beralkohol dalam keadaan mabuk bersama rekan-rekan Tergugat di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat.
13. Bahwa kemudian dikarenakan Penggugat sudah tidak kuat lagi menghadapi tingkah laku dan tindakan pemukulan yang masih terulang, perlakuan kasar,

ancaman dengan benda tajam seperti badik, dilempar rokok yang masih dalam keadaan menyala. Sikap dari Tergugat tersebut yang menjadikan Penggugat tidak ingin lagi untuk melanjutkan perkawinan dengan Tergugat.

14. Bahwa percekcoakan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terjadi terus-menerus tersebut, sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana dimaksud Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan: Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam: Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan gholidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.
15. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan karena terjadi cekcok yang terus-menerus sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya mohon perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
16. Bahwa dikarenakan anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama Aries Fauzi As'ad belum mumayyiz karena masih berusia 1 tahun dan oleh karenanya masih membutuhkan pemeliharaan, perawatan, dan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibu kandungnya, oleh karenanya mohon hak hadhanah sebagaimana terhadap anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diberikan kepada Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

#### Provisi

Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama Aries Fauzi As'ad, berusia 1 tahun, lahir di Gowa tanggal 15 Juli 2015 kepada Penggugat untuk mendapatkan pengasuhan/pemeliharaan dan perawatan dari Penggugat sebagai ibu kandung anak tersebut.

Primer:

1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 8 Maret 2015 di KUA kecamatan Somba Opu, berdasarkan akta nikah No: 0123/011/III/2015, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menetapkan hak hadhanah anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama Aries Fauzi As'ad, lahir di Gowa, tanggal 15 Juli 2015, diberikan kepada Penggugat.
4. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding, dan kasasi (*uit voorbar bij voorad*).



5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa Kab. Gowa untuk mengirimkan salinan keputusan ini kepada pejabat yang berwenang supaya mencatat perceraian tersebut dalam daftar umum yang disediakan untuk itu.
6. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Subsider:

*Ex aequo et bono*, apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Hakim yang mengadili dan memutus perkara tersebut, hakim mengatakan bahwa:

“Saya sebagai salah satu hakim yang menangani perkara ini berpendapat bahwa Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk diperbaiki lagi, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dan al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21, tidak mungkin dapat dicapai oleh Penggugat dan Tergugat, Kami berpendapat alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Pertimbangan-pertimbangan yang kami lakukan kepada gugatan Penggugat telah beralasan hukum, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat kepada Penggugat. Sehingga dengan dikabulkannya pokok perkara yaitu perceraian Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan hadhanah terhadap anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, bernama: Aries Fauzi As'ad bin Taufan Imani Muhammad yang lahir pada tanggal 15 Juli 2015, sekarang anak tersebut kadang dipelihara oleh orang tua Penggugat dan kadang dipelihara oleh orang tua Tergugat. Padahal Tergugat telah mengajukan penawaran perdamaian tertanggal 9 April 2017 kepada Penggugat, namun kesepakatan damai tidak tercapai karena Penggugat tetap ingin hak asuh anak dipegang oleh Penggugat, walaupun Penggugat siap menjalankan poin lain dari tawaran perdamaian tersebut, sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang. Karena pada dasarnya sejalan dengan penjelasan tersebut, bahwa dalam hal pemeliharaan anak semata-mata dimaksudkan untuk kepentingan anak itu sendiri, yakni demi keselamatan jasmani maupun rohani anak, bahwa hal yang dijadikan pertimbangan dalam memutuskan hukum dalam sengketa hadhanah adalah kemaslahatan anak-anak itu sendiri, bukan kemaslahatan ibu dan ayahnya. Pihak mana yang dipandang layak dan pantas serta dapat menjamin kemaslahatan anak, maka pihak itulah yang harus dinyatakan berhak untuk melakukan hadhanah.

Adapun dalam kasus ini di dalam persidangan terbukti Penggugat jarang mengurus anaknya dan yang mengurus anaknya adalah babysitter, Penggugat merokok dan Penggugat kadang pulang malam dalam keadaan mabuk, bahkan

ketika Penggugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat, Penggugat beberapa kali pergi ke tempat hiburan malam, di sana Penggugat merokok, mabuk-mabukan dan bernesraan dengan laki-laki selain Tergugat.<sup>2</sup>

dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *Ghayatul Maram lil Syarh al-Majdi*:

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً.

Artinya: “Di waktu si istri sudah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak satu atas suaminya”.

Dan dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah*:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya: “Apabila gugatan istri itu diterima oleh hakim yang berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh istri atau adanya pengakuan suami, dan istri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim menceraikan istri itu dengan talak satu ba'in.”

#### **D. Analisis Penulis**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis putusan yang telah dilakukan, secara garis besar penulis berpendapat bahwa dasar hukum yang dijadikan dalam pertimbangan hakim ketika memutuskan perkara hak asuh anak dilimpahkan kepada ayah adalah berdasarkan dalil-dalil serta bukti-bukti dari pemohon. Undang-undang dan juga menggunakan dasar hukum yang bersumber dari Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam.

Sebagaimana kita ketahui bahwa hadhanah, secara bahasa berarti, melakukan sesuatu di dekat tulang rusuk atau di pangkuan, karena ibu waktu

---

<sup>2</sup>Muhammad Najmi Fajri (35 Tahun), Hakim Pratama Madya Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa Wawancara, 14 November 2018.

menyusukan anaknya meletakkan anak itu di pangkuannya, seakan-akan ibu disaat itu melindungi dan memelihara anaknya.

Pada dasarnya kebutuhan seorang anak adalah meliputi kebutuhan fisik, psikis, sosial dan spritual. Kebutuhan fisik merupakan kebutuhan makan, minum, pakaian, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Kebutuhan psikis meliputi kebutuhan akan kasih sayang, rasa aman diterima dan dihargai. Sedangkan kebutuhan sosial

Dalam kasus ini Majelis Hakim memberikan keputusan mengenai hak pemeliharaan dan pengasuhan anak yang dilimpahkan kepada penggugat dengan berdasarkan Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu memikul biaya.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Dari Pasal 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali ada hal yang menentukan yang lain. Kemudian berdasarkan Pasal 105 huruf (a) KHI Impres No. 1 tahun 1991 yang berbunyi



apabila terjadi perceraian, maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.

Pemeliharaan anak pasca cerai atau *hadhanah*, pelaksanaannya tidak sebatas pada kegiatan formalitas yang begitu saja tanpa dibarengi dengan mendidik yang bertujuan untuk menjadi anak sehat baik fisik maupun psikisnya.

Salah satu hal yang penting yang mungkin kurang dipertimbangkan oleh kedua orang tua ketika terjadi perceraian adalah tanggungjawab kedua orang tua, baik ketika orang tuanya masih hidup atau hilang tidak diketahui keberadaanya atau juga karena terjadi perceraian. Pemeliharaan ini meliputi berbagai hal, pemeliharaan ini meliputi berbagai hal, diantaranya masalah ekonomi, pendidikan dan masalah-masalah lain yang menjadi kebutuhan pokok anak.

Menurut Syaikh Hasan Ayyub bahwa pemeliharaan dan pendidikan yang baik adalah menjaga memimpin dan mengatur segala hal yang anak-anak itu belum mampu dan sanggup mengaturnya sendiri, maka dalam pemeliharaan dan pengasuhan oleh kedua orang tuanya yakni bapak dan ibunya, sehingga anak akan dapat tumbuh sehat jasmani dan rohaninya. Akan tetapi seandainya kedua orang tua terpaksa bercerai, sedangkan keduanya mempunyai anak yang belum *mumayyiz*, maka ibulah yang berhak dan mendidik dan merawat anak itu hingga ia mengerti kemaslahatan dirinya.

Hak pemeliharaan di dalam Pasal 41 undang-undang Nomor 41 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, sekalipun kedua orang tua anak tersebut sudah tidak bersama lagi dalam hal ini adalah bercerai, baik ibu ataupun ayah dari anak tersebut tetap berkewajiban mendidik dan memelihara anak tersebut, semata-mata

demikian kepentingan si anak. Jika terjadi sengketa mengenai hak pemeliharaan anak sudah jelas hakim Pengadilan Agama yang akan memberi putusannya sesuai dengan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan ke Pengadilan Agama dalam persidangan. Karena dalam masalah hak asuh anak adalah persoalan yang menyangkut masa depan lahir dan batin, perkembangan moral dan akhlak, pendidikan agama seorang anak.

Dalam melaksanakan hadhanah bagi suami isteri yang bercerai jika anak tersebut belum mumayyiz maka ibunya yang lebih berhak daripada ayah, namun dalam hal ini untuk mendapatkan atau melaksanakan hadhanah bukanlah suatu hal yang mudah, karena walaupun hadhin adalah orangtua kandung si anak atau dari kalangan ibu secara berurutan bukan berarti ia begitu saja menguasai atau dapat melaksanakan hadhanah tetapi ia juga harus amanah, dan mampu mendidik. Tidak hanya seorang hadhin harus mempunyai kemampuan secara materi saja.

Dan tidak selamanya hadhanah itu jatuh kepada ibu, bahkan juga jatuh kepada garis keturunan ibu ke atas, sang bapak pun mempunyai hak yang sama dengan ibu, akan tetapi di dalam Islam ibu dan garis keturunan ibu yang menjadi prioritas pertama dalam pengasuh anak dengan catatan ibu harus memenuhi persyaratan yang ada.

Karena dalam hal pengasuhan anak ini yang pertama harus diperhatikan adalah kepentingan anak tersebut dan memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk memberikan rasa aman kepada anak yang menjadi korban perceraian, dalam hal ini Majelis Hakim mengutamakan bagaimana memberi perlindungan dan

kebaikan bagi anak demi kemaslahatan dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh orangtuanya.

Dari penjelasan diatas penulis berpendapat bahwasannya dalam kasus ini. Posisinya si Ibu yang selaku sebagai (Penggugat) yang secara undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 41 mengenai hak pemeliharaan dan pengasuhan anak yang dilimpahkan kepada penggugat. Akan tetapi dalam persidangan terbukti Penggugat jarang mengurus anaknya dan yang mengurus anaknya adalah babysitter, Penggugat merokok dan Penggugat kadang pulang malam dalam keadaan mabuk, bahkan ketika Penggugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat, Penggugat beberapa kali pergi ke tempat hiburan malam, di sana Penggugat merokok, mabuk-mabukan dan bernesraan dengan laki-laki selain Tergugat. Karena sejatinya untuk membesarkan anak, orang tua harus menjadi figur yang bisa menjadi panutan bagi anaknya dan dapat memberikan perhatian yang selayaknya didapatkan oleh anak.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

1. Hadhanah ialah memelihara anak yang belum mumayyiz (belum mampu mengurus dirinya sendiri). Hak pemeliharaan anak akibat perceraian menurut fikih ialah ibu dari pada ayahnya. Sedangkan menurut KHI pada pasal 105 (a) bahwa hak pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak terlalu banyak membahas siapa yang lebih berhak untuk mengasuh anak setelah perceraian, tetapi orang tua berkewajiban memelihara anaknya sampai anak tersebut menikah. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang lebih berhak untuk memelihara anak adalah salah satu dari kedua orang tuanya yang dekat dengan anaknya. Sehingga membuat anak merasa nyaman dan tenang berada disamping salah satu orangtuanya tersebut.
2. Seorang hakim sangat mempertimbangkan kepentingan dan hak-hak anak dalam memutuskan suatu perkara hadhanah. Oleh karena itu, hakim dalam memutuskan suatu perkara selain menggunakan sumber fikih, hakim juga menggunakan Undang-Undang dimana hak-hak anak sangatlah diprioritaskan.

## ***B. Saran***

1. Pemeliharaan anak merupakan suatu tugas yang harus diperhatikan secara betul dan bijak. Karena anak merupakan aset negara yang paling berharga dan generasi yang akan memimpin negara ini ke depan. Mereka pula yang menentukan arah pembangunan dan perbaikan yang lebih baik. Untuk itu, anak harus dididik dan dibesarkan oleh orang yang mempunyai kemampuan, kesempatan dan keahlian yang mapan agar dapat menjamin eksistensi kehidupannya. Hal ini bertujuan agar anak tumbuh dewasa dalam lingkungan yang baik dan berguna bagi bangsa dan Negara ke depan.
2. Dalam membuat putusan, Majelis Hakim memasukkan segala alasan-alasan persetujuan antara Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan anak serta faktor-faktor yang mempengaruhi kedekatan antara ayah dengan anaknya. Hal ini bertujuan untuk memperjelas isi dari putusan tersebut dan mudah dipahami oleh orang-orang yang ingin membacanya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Terjemahan. Departemen Agama Republik Indonesia, Surabaya: 1987
- Abdurraman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2007.
- Abidin, Slamet. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia, Jilid II.
- Al-Hamdani. *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Pustaka Amini, 2002.
- Al Munawar, Husein Agil said. *Problematika Hukum Keluarga Islam*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Al-Zuhaili Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh Juz VII*. Damaskus: Daar Al-Fikr, 1984.
- Ali Zainuddin. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafindo, 2006.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002
- Bisri, Hasan Cik. *Kompilasi Hukum Iskam Dan Peradilan Agama (Dalam Sistem Hukum Nasional)*. Jakarta: Logos, 1999.
- Djubaedah Neng, dkk. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT. Hecca Utama, 2005.
- Efendi satria, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: PT. Kencana, 2004.
- Istiqamah. *Hukum Perdata*. Makassar: Alauddin University Press, 2012.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003.
- Muhammad, Abdulkadir . *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- Maloko, Thahir. *Dinamika Hukum Dalam Perkawinan*. Makassar: Alauddin University Press, 2012.

- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Mughniyyah, Muhammad Jawa. *Fikih Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera , 2006.
- Muhammad Syaikh Kamil dan Uwaidah Muhammad. *Fiqih Wanita*. (Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2004)
- Nuruddin, Amiur. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Prinst, Darwin. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
- Sahrani Sohari, Tihammi. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: PT Rajawali Pers, 2013.
- Sabid, Sayyid. *Fiqih Sunah 8*. Bandung: PT. Al Ma'rif, 1996
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Citra, 2015.
- Sulistiani, Lis Siska. *Kedudukan Hukum Anak*. Bandung: Refika Aditama, 2015.
- Syaifuddin, Muhammad. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar grafika, 2016.
- Thalib Sajuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Zaeni, Muderis. *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Segi Sistem Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- Zein M, Effendi Satria. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta Kencana Prenada Media, 2004.

**Perundang-undangan**

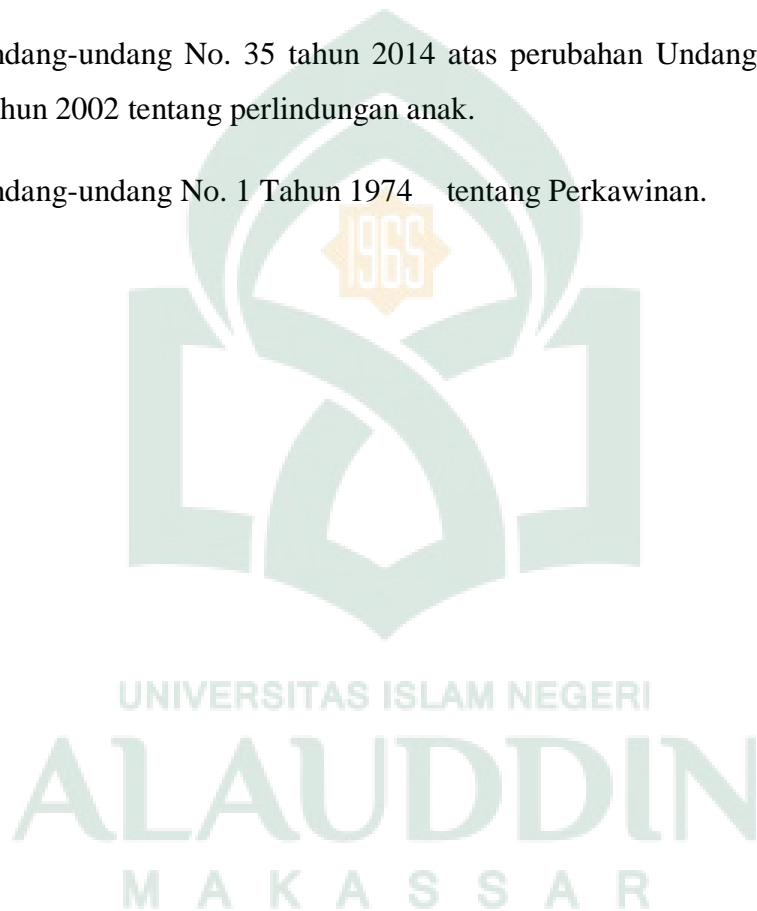
Kompilasi Hukum Islam

Konvensi Tentang Hak-Hak Anak (*Convention on The Right of The Child*)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-undang No. 35 tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.





## RIWAYAT HIDUP



ANDI HARDYANTI FAHRI, Dilahirkan di Kabupaten Kepulauan Selayar tepatnya di Kelurahan Benteng Kecamatan Benteng pada hari selasa tanggal 4 Juni 1996. Anak ke dua dari tiga bersaudara pasangan dari H. Fahriadi dan HJ. Masdawati. Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SDN Benteng II di Kecamatan Benteng Kabupaten Selayar pada tahun 2008. Pada tahun itu juga penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri Benteng I Selayar dan tamat pada tahun 2011 kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas di Selayar hingga Tamat pada tahun 2014. Pada tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikan S1 di perguruan tinggi negeri, tepatnya di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UIN) Fakultas Syariah dan Hukum pada Jurusan Ilmu Hukum (IH) Makassar.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R